

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM UPAYA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI
PENDIDIKAN DAN EKONOMI**

(Studi Program Pelatihan PKK di Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk
Pandan, Kabupaten Pesawaran)

(Skripsi)

Oleh

MentariLarasati



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PENDIDIKAN DAN EKONOMI

(Studi Program Pelatihan PKK di Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan,
Kabupaten Pesawaran)

Oleh
Mentari Larasati

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberdayaan masyarakat yang tidak optimal dalam proses pengembangannya. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pola pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui pendidikan dan ekonomi. Ada pun tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan berkaitan dengan PKK Desa Talang Mulya.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jumlah informan sebanyak 5 informan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Teknik keabsahan data dilakukakan dengan cara teknik triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya tahapan-tahapan pemberdayaan. Tahap *pertama* yaitu kesadaran, cara pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli. *Kedua*, tahap transformasi kemampuan yaitu proses belajar membuat suatu ketrampilan yang bernilai mutu. *Ketiga*, tahap peningkatan kemampuan intelektual yaitu melatih kecakapan ketrampilan untuk mandiri. Faktor pendorong dalam penelitian ini adalah respon positif, kerjasama dalam pemasaran, Potensi sumber daya alam bahan baku yang melimpah dan mudah diperoleh di sekitar wilayah Desa Talang Mulya. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan PKK Desa Talang Mulya adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat; Masyarakat cenderung menunggu bantuan dana dari Pemerintah; Kurangnya dana yang diperlukan untuk proses kegiatan tersebut; serta Kurangnya dampingan tim ahli.

Berdasarkan hasil penelitian diajukan beberapa saran, *pertama*, bagi PKK Desa Talang Mulya lebih meningkatkan pemberian penyuluhan tentang program pelatihan PKK kepada masyarakat, memperhatikan kesehatan para pekerja dan lingkungan kerja yang kondusif. *Kedua*, bagi pemerintah Desa Talang Mulya agar memberikan pengarahan dalam pemberdayaan masyarakat khususnya tentang cara penggunaan alat produksi, melengkapi sarana prasarana penunjang pemberdayaan. agar pelatihan bisa berjalan lebih baik lagi dan semakin berkembang.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat Desa, Kesejahteraan Keluarga Pendidikan, Ekonomi

ABSTRACT

EMPOWERMENT OF VILLAGE COMMUNITY TO INCREASE FAMILY WELFARE THROUGH EDUCATION AND ECONOMICS

(Study of PKK Training Program in Talang Mulya Village, Teluk Pandan Sub-District, Pesawaran District)

By
Mentari Larasati

This research is motivated by community empowerment that is not optimal in its development process. this research seeks to know the pattern of empowerment done by the community in efforts to increase welfare through education and economy. There is a purpose is to determine the factors that drive and inhibit the empowerment associated with PKK Talang Mulya Village.

The method used in this research is qualitative method with descriptive approach. Number of informants as many as 5 informants. Data collection techniques use observation, documentation, and in-depth interviews. The technique of data validity is done by means of data triangulation technique.

The results showed that the stages of empowerment. The first stage is awareness, how to form behavior toward conscious and caring behavior. Second, the stage of ability transformation is the process of learning to make a skill that is of quality value. Third, the stage of intellectual ability improvement is to train the skills skill to be independent. The driving factors in this research are positive response, cooperation in marketing, natural resource potential of abundant and easy to obtain material around Talang Mulya Village area. While the factor inhibiting the implementation of PKK Talang Mulya Village is the low level of community education; Communities tend to wait for funding from the Government; Lack of funds required for the process of such activities; and Lack of expert assistance.

Based on the results of study, several suggestions were proposed, firstly, for PKK Desa Talang Mulya further improve the provision of counseling about PKK training programs to the community, taking into account health of workers and a conducive working environment. Secondly, for Talang Mulya village government to provide guidance in community empowerment, especially about how to use the production equipment, equip the empowerment support infrastructure facilities. Training can run better and more developed.

Keywords: *Empowerment, Village Community, Family Welfare Education, Economy*

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM UPAYA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI
PENDIDIKAN DAN EKONOMI**

(Studi Program Pelatihan PKK di Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk
Pandan, Kabupaten Pesawaran)

Oleh

MentariLarasati

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi

: **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN DAN EKONOMI (Studi Program Pelatihan PKK di Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)**

Nama Mahasiswa

: **Mentari Larasati**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1316011050

Jurusan

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

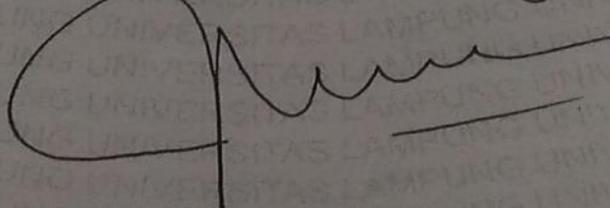
1. **Komisi Pembimbing**



Dr. Benjamin, M.Si.

NIP 19560417 198603 1 001

2. **Ketua Jurusan Sosiologi**



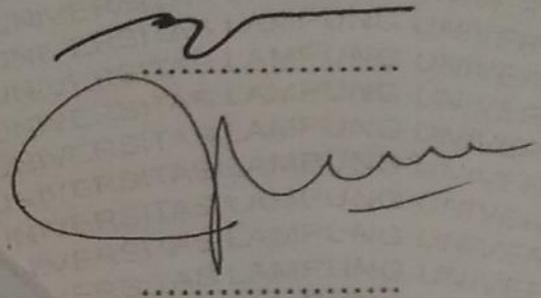
Drs. Ikram, M.Si.

NIP 19610602 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Benjamin, M.Si.**



.....

Penguji Utama : **Drs. Ikram, M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **31 Januari 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister/Sarjana/Ahli Madya) baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengaruh dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 Januari 2018

Yang membuat pernyataan



Mentari Larasati
NPM. 1316011050

RIWAYAT HIDUP



Mentari Larasati dilahirkan pada tanggal 17 Januari 1996 di Kelapa Provinsi Bangka Belitung Anak ke empat dari enam bersaudara pasangan dari Bapak Isti Bagio dan Ibu Idelaroaiattal.

Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh antara lain diawali dari tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kelapa pada tahun 2001, lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kelapa pada tahun 2007, lulus pada tahun 2010 serta melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pemali pada tahun 2010, lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013, terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang diterima melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Selama menjadi mahasiswa, aktif di organisasi yaitu Kemahasiswaan yaitu UKM KSR PMI Unit UNILA, pada tahun 2013 sebagai Anggota dan pada tahun 2015 sebagai Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat UKM KSR PMI Unit Unila periode 2015-2016. Pada periode pertama tanggal 18 Januari - 17 Maret 2016 (selama 60 hari) penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bertempat di Desa Karang Sari, Kec. Nanningan, Kab. Tanggamus Periode Januari-Maret 2016.

MOTTO

“Jalanilah hidupmu. Bahkan jika itu menyakitkan, tetaplah hidup.

Jika kau bertahan, itu berarti kau telah menang”

(Mentari Larasati)

“Jangan terlalu khawatir

Hanya karena kau sudah melalui hari ini

Bukan berarti kau tahu apa yang akan terjadi besok.”

(Yoon Ji-Ho)

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).*

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

PERSEMBAHAN



Segala puji bagi Allah dan bersyukur atas segala nikmat dan hidayah-Nya yang telah memeberikan nikmat sehat dan iman, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kesulitan yang dapat menjadikan kita manusia yang lebih berkualitas. Karya ini di persembahkan kepada :

Ibu dan Bapakku yang selalu memberikan nasihat, semangat, do'a serta yang tak pernah menampakkan kesulitan kepada anak-anaknya. Terima kasih juga untuk Kakak-Kakak, Aak, Adik-Adikku, Nenek, dan keluarga besar ku yang lain, terima kasih utuk perhatian dan doa kalian semua. Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk Firda Nur Islami, seseorang yang tidak pernah mengeluh dan seseorang yang selalu membantu dalam pembuatan skripsi ini.

SANWACANA



Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat serta hidayanya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini berjudul “berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pendidikan dan Ekonomi (Studi Program Pelatihan Pkk Di Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)**” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Dengan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dan peneliti telah banyak mendapatkan bimbingan dari semua pihak, dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
Bapak Drs. Ikram, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim. selaku Sekertaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Bapak Dr. Hartoyo, M. Si. Selaku dosen pembimbing akademik.

3. Bapak Dr. Benjamin, M.si., selaku Pembimbing atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran serta motivasi yang sangat berguna bagi kedepannya.
4. Ibu Dr. Ikram, M. Si., selaku pembahas dosen, atas kesediaannya dalam memberikan masukan, kritik, juga saran dalam skripsi ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terimakasih atas bimbingan dan motivasi serta pengalaman dan kesabarannya dalam memberikan ilmu.
6. Mbak Vivi dan bang Arif selaku staf administrasi jurusan sosiologi, terima kasih atas bantuannya dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan jurusan.
7. Bapak, Ibu....terima kasih utuk doa, dukungan dan motivasinya serta selalu mendampingi Mentari di segala keadaan. Mentari sayang bapak dan ibu.
8. Abang Iid , Bang badar, dan Aak terima kasih atas nasehat dan motivasinya untuk adek yang super manja, jail n cengeng ini. Is the best pokoknya
9. Untuk Ana dan Ani, adek super bawel dan ngeselin yang selalu menyemangati ayi untuk cepat lulus, biar cepet pulang ke Bangka, dan cepet dapet kerja tanpa ada kata bosan. Kalian hiburannya ayi.
10. Sahabat seperjuangan semasa kuliah (Iis, Ipeh, Elsa, Panca, Mbak Rizki, Pakle (Anjas), Irfan, Wega, Yulia, Tiara, Ara, Tiwi, Hanan, Cici, Aulia,

Angsori, Egi, Dwi, Dewi, Nisa dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu) terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Tak lupa doa dan semangatnya saling menguatkan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan pula, amiiiiinn. Terus silaturahmi ya kesayangan Mentari.

11. Keluarga UKM KSR PMI Unit Unila yang tercinta dan Khususnya Angkatan 23 (Andri, Mentari, Iis, Firda, Biha) Semangaaaat untuk perjuangan Skripsi nya.
12. Untuk Firda Nur Islami yang gak bosennya Mentari sebut, Terimakasih atas kesabaran, nasehat, dukungan, canda tawa serta kebersamaannya yaaaaa :)
13. Untuk Kasripatakom, Ardianti, Anggun makasih udah mau direpotin kesana- kesini dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi.
14. Ucup, Ridho, Deni, Nasrul, Nanang, Azzam, kak Agung, kak juanda, Bg Wiji Makasih selalu membantu, motivasi, dan menguatkan disaat Mentari mulai putus asa sama Skripsi.
15. Untuk keluarga besar kossan Green house, kossan Maleo, kossan Sabila terima kasih ya untuk motivasi dan canda tawa yang menemani dalam proses penulisan.
16. Kepada rekan-rekan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode pertama Universitas Lampung tahun 2016 di Desa Karang Sari, Kec. Naningan, Kab tanggamus yaitu Filosofi, Kubil, Bg Bagas, Bg Reza, Agtari terima kasih selalu ngingetin untuk cepat wisuda meskipun dengan ledekan-ledekan.

17. Kepada seluruh pihak yang telah berperan besar membantu peneliti dalam menyelesaikan proses studi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kalian, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Bandar Lampung, Februari 2018

Penulis,

Mentari Larasati

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

ABSTRACT

HALAMAN JUDUL

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

HALAMAN MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6

F. Manfaat Penelitian	6
1. Secara Teoritis.....	6
2. Secara Praktis	6

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat.....	8
B. Masyarakat Pedesaan	18
C. Kesejahteraan Keluarga	23
1. Pengertian Kesejahteraan	23
2. KriteriaEkonomiKesejahteraan	30
3. Pengukuran Kesejahteraan	37
D. Kemiskinan	39
E. Pelatihan Ketrampilan.....	41
F. Penelitian yang Relevan.....	44
G. Kerangka Berpikir.....	45

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Fokus Penelitian	50
D. Sumber-Sumber Data	51
E. Teknik Sampling	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
G. Teknik Analisis Data.....	53
H. Teknik Keabsahan Data	54

IV. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Talang Mulya	56
B. Kondisi Geografis	57
C. Kondisi Perekonomian	57
D. Kondisi Sosial Budaya	59
E. Kondisi Sarana Dan Prasana	59
F. Pemerintahan Umum.....	60
G. Peta Wilayah Desa Talan Mulya	65
H. Sejarah Singkat PKK di Desa Talang Mulya.....	65

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan	74
B. Deskripsi Hasil Penelitian	75
1. Nama Kegiatan	75
2. Profil Anggota Warga Belajar.....	76
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	78
4. Keadaan Masyarakat Desa Talang Mulya Setelah Diadakanya Pemberdayaan Melalui Pelatihan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga.....	81
5. FaktorPendorongdanPenghambatPelatihanBerkaitan dengan PKK di DesaTalangMulya.....	84
C. Pembahasan.....	91

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	95
6.2 Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tata Guna Tanah	51
2. Jumlah Penduduk	52
3. Jumlah Kepala Keluarga	52
4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Talang Mulya	52
5. Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	53
6. Pendidikan Formal	54
7. Prasarana Kesehatan.....	54
8. Tenaga Kesehatan	54
9. Sarana Prasarana Ibadah Desa	55
10. DataanggotawargabelajarPKKberdasarkan usia	71
11. DataanggotaWargaBelajar Pelatihan PKK Berdasarkan Pendidikan Terakhir	71
12. Alasan Bergabungnya Masyarakat Menjadi Warga Belajar Pelatihan	72
13. Mata Pencaharian Penduduk Desa Talang Mulya	73

DAFTAR GAMBAR

1. Kriteria Kaldor Hicks	29
2. Bagan Kerangka Berpikir.....	42
3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.....	56
4. Peta Wilayah Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran tahun 2017	59

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada saat ini telah berkembang sangat pesat di Indonesia. Pembangunan tersebut meliputi berbagai bidang, seperti di bidang sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Pelaksanaan pembangunan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Pembangunan yang dilakukan di daerah pedesaan tidak kalah berkembangnya dengan pembangunan yang dilakukan di daerah perkotaan. Saat ini, pemerintah kebanyakan lebih memfokuskan pembangunan di daerah perkotaan saja, namun seiring berjalannya waktu tersebut lambat laun mulai berubah, dimana pembangunan di pedesaan juga sangat menunjang perekonomian negara. Salah satunya adalah pada sektor pertanian yang merupakan sumber kebutuhan sehari-hari masyarakat (Adhary, 2012).

Berbagai upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan pembangunan desa, diantaranya dengan mengembangkan organisasi-organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan kelompok-kelompok di pedesaan, seperti program PNPM-Mandiri, (PPK) Program Pengembangan Kecamatan, dan (PKK) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Sebagai bagian yang terlibat dalam sebuah organisasi tertentu, kaum perempuan juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa

dengan menggerakkan partisipasi di masyarakat pedesaan dalam pembangunan, juga berperan dalam kegiatan pertumbuhan desa. PKK sebagai gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Adapun 10 program yang dimiliki oleh PKK, yaitu penghayatan dan pengalaman pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat (Juliantara, 2005).

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya guna. Setiap anggota masyarakat dalam suatu komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan dan kemampuan untuk membawa diri dan komunitasnya menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa dikembangkan karena faktor-faktor tertentu. Maka dari itu, untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di suatu komunitas, diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam rangka membangun masyarakat madani. Proses penyadaran masyarakat tersebut dilakukan melalui konsep-konsep pengembangan kapasitas. Melalui konsep ini dilakukan upaya pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

Pengembangan kapasitas masyarakat pada hakikatnya merupakan usaha meningkatkan kemampuan masyarakat itu sendiri, sehingga kegiatan tersebut

seharusnya mendapat dukungan dan peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat sebagai pihak yang paling berkepentingan belum memahami secara betul makna dari pengembangan kapasitas itu sendiri dan tidak memberikan tanggapan secara positif terhadap upaya-upaya pengembangan kapasitas yang dilaksanakan, maka dapat dipastikan upaya tersebut tidak akan berdaya guna dan berhasil sesuai tujuan yang ingin dicapai, seperti yang dijelaskan oleh Wilson (1996) di mana ada empat tahapan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu tahap penyadaran, tahap pemahaman, tahap pemanfaatan, dan tahap pembiasaan. Tahap pembiasaan sendiri merupakan tahapan paling akhir dalam proses pemberdayaan, dimana masyarakat telah terbiasa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan di lingkungannya, karena pada dasarnya hasil atau keluaran yang diperoleh adalah untuk kepentingan mereka sendiri.

Sehubungan dengan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan kapasitas masyarakat di Desa Talang Mulya Kabupaten Pesawaran yang merupakan desa pemekaran dan tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong rendah yaitu lulusan SMA/Sederajat hanya 40 orang, sedangkan kebanyakanya lulusan SD/Sederajat sebanyak 500 KK. Disamping itu, di Desa Talang Mulya hanya memiliki satu sekolah dasar (SD) yang terbilang masih minim perhatian dari pemerintah. Apalagi kurangnya tenaga pengajar, bangunan fisik dan fasilitas belajar mengajar yang masih kurang memadai. Gedung sekolah dasar ini juga digunakan secara bersama dengan SMP yang ada di desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, beberapa masyarakat tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena sarana-prasarana tidak memadai, sehingga mereka harus keluar dari desa. Padahal pendidikan merupakan

kebutuhan pokok bagi manusia, sehingga dapat membuka wawasan dan meningkatkan kesejahteraan, salah satunya dalam segi ekonomi (Data Demografi Desa Talang Mulya Tahun 2016).

Desa Talang Mulya memiliki sumber daya alam yang subur salah satunya sebagai penghasil buah. Berdasarkan sumber data umum Desa Talang Mulya (>90%) penduduknya berprofesi sebagai petani kebun dengan enam komoditas unggulan yaitu pisang, salak, durian, melinjo, kopi, dan kakao. Adapun hasil pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan dengan warga dan tokoh masyarakat, penghasilan yang diperoleh dari penjualan produk pertanian tidak menjanjikan atau hanya di musim tertentu saja, sehingga belum mampu mencapai hasil yang maksimal. Warga Desa Talang Mulya sangat menyayangkan bahwa dari sekian banyak potensi dan keterampilan yang dimiliki dalam mengelolah hasil pertanian, juga banyak produk pertanian yang telah dihasilkan tidak mampu dipasarkan secara baik. Pemberian pelatihan berkaitan dengan PKK diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dari di dalam serta kehidupan sosial masyarakat Desa Talang Mulya.

Sehubungan program pelatihan dan kesejahteraan keluarga ada kekhawatiran warga Desa Talang Mulya akan hal tersebut, di mana menggerakkan anggota warga masyarakat dengan melakukan pelatihan secara otodidak. Sepertinya dalam pelaksanaannya masih banyak kendala, salah satunya yakni minimnya pengetahuan penggunaan peralatan produksi, dan tidak adanya pendamping sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap tujuan yang diharapkan.

Melihat permasalahan muncul, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan pelatihan tersebut agar dapat diketahui peranannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat agar menjadi lebih baik dan berkualitas. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan, dan ekonomi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa masalah yang terdapat di Desa Talang Mulya yang merupakan desa tertinggal ialah kurangnya pemberdayaan dan pembinaan, yang menyebabkan banyak potensi desa yang belum dapat dikelola secara maksimal. Kesadaran masyarakat akan pendidikan juga masih rendah. Sehingga yang menjadi permasalahan adalah kurangnya pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan dan ekonomi.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka penelitian hanya dibatasi pada pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan dan ekonomi di Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah yang ada yaitu :

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat di Desa Talang Mulya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan dan ekonomi ?
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor pendorong dan penghambat pelatihan berkaitan dengan PKK di Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan:

1. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan dan ekonomi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat pelatihan berkaitan dengan PKK

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep ilmu sosiologi pemberdayaan dan sosiologi pembangunan, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dalam pendidikan dan ekonomi di Desa Talang Mulya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Desa Talang Mulya agar memahami betapa pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk dapat mengembangkan Desa Talang Mulya.

b. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Desa Talang Mulya. Selain itu, sebagai bahan acuan pengelolaan Desa yang ada di Kabupaten Pesawaran.

bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Berkenaan dengan pengertian pemberdayaan masyarakat, Winarni dalam Sulistyani (2004: 79) mengungkapkan bahwa pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu: a. pengembangan (*enabling*), b. memperkuat potensi atau daya (*empowering*), c. dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Sedangkan menurut Rusmiyati (2011) pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Sulistyani (2004) pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya. Pemberdayaan menurut Suparjan dan Hempri (2003), mengatakan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua arti yaitu *to give or authority* dan *to give to or enable*. Merujuk pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Selanjutnya

dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan dalam sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Konsep pemberdayaan menurut Tricahyono (2008) berkaitan dengan dua istilah yang saling bertentangan, yaitu konsep berdaya dan tidak berdaya terutama bila dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan menguasai potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek pembangunan, hakikat pembangunan nasional menurut Priyono & Pranaka (1996) adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya, dengan kata lain memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Di samping itu, juga mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah. Menurut Sudjana (2001) pentingnya pembangunan masyarakat yang menitikberatkan sektor ekonomi ialah agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pertumbuhan sektor ini, tanpa mengabaikan peranan sektor-sektor lainnya, dan sekaligus dapat menurunkan tingkat kemiskinan penduduk.

Berdasarkan penjelasan di atas, dinyatakan bahwa konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera. Pemberdayaan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan yang bisa

membangun masyarakat ke arah lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan, menurut Usman (2010) usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya cukup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai kebutuhan sehingga masyarakat dapat mandiri, percaya diri, dan tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara. Dalam pemberdayaan perlu dipikirkan siapa saja yang akan menjadi sasaran pemberdayaan. Sasaran pemberdayaan yang dimaksud yaitu siapa yang akan menjadi kelompok atau masyarakat yang akan di berdayakan, menurut Schumacer dalam Sulistyani (2004), memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural terlebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun. Disamping itu NGO (*Non-Governmental Organization*) merupakan agen yang memiliki posisi penting, karena dipandang lebih bersifat wiraswasta, berpengalaman dan lebih inovatif dibanding pemerintah. Pemaknaan pemberdayaan selanjutnya seiring dengan konsep *good governance*. Konsep ini mengetengahkan tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat yang hendaknya menjalin kemitraan yang selaras.

Pemberdayaan sendiri memiliki prinsip-prinsip dalam prosesnya, prinsip pemberdayaan menurut Mathews dalam Totok & Poerwoko (2012) menyatakan bahwa “Prinsip adalah suatu pernyataan tentang Kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans dalam Totok & Poerwoko (2012) menilai bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan.

Prinsip pemberdayaan menurut Tricahyono (2008) mengemukakan prinsip-prinsip pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a) Pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat lokal
- b) Lebih mengutamakan aksi sosial
- c) Menggunakan pendekatan organisasi komunitas atau kemasyarakatan lokal
- d) Adanya kesamaan kedudukan dalam hubungan kerja
- e) Menggunakan pendekatan partisipatif, para anggota kelompok sebagai subjek bukan objek
- f) Usaha kesejahteraan sosial untuk keadilan

Berdasarkan uraian di atas, dinyatakan bahwa prinsip pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut, dilandasi oleh nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut dan harus mampu menggerakkan partisipasi masyarakat agar lebih berdaya. Dalam memberdayakan masyarakat dibutuhkan tahap pemberdayaan yang jelas

dan terarah, disebutkan tahap-tahap pemberdayaan menurut Suparjan & Suyatna (2003) dalam rangka pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

- a) Meningkatkan kesadaran kritis atau posisi masyarakat dalam struktur sosial politik. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa sumber kemiskinan berasal dari konstruksi sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri.
- b) Kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat masyarakat mampu membuat argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi serta sekaligus membuat keputusan terhadap hal tersebut.
- c) Peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks ini perlu dipahami, bahwa masalah kemiskinan bukan sekedar persoalan kesejahteraan sosial tetapi berkaitan dengan faktor politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan.
- d) Pemberdayaan juga perlu meningkatkan dengan pembangunan sosial budaya masyarakat.

Kemudian Sulistyani (2004), bahwa pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jauh. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Sebagaimana disampaikan di atas bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap.

Menurut Sulistyani (2004), tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat akan kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Sentuhan akan rasa ini akan membawa kesadaran masyarakat bertumbuh, kemudian merangsang semangat kebangkitan mereka untuk meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan. Dengan adanya semangat tersebut diharapkan akan dapat menghantarkan masyarakat untuk sampai pada kesadaran dan kemauan untuk belajar. Dengan demikian masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan untuk memperbaiki kondisi.

Pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika

tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-ketrampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan ketrampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-kerampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat dalam kondisi seperti ini seingkali didudukan sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitatornya saja. Sejalan dengan pendapat Sumodiningrat dalam Sulistyani (2004) maka masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Masyarakat tersebut tetap memerlukan perlindungan, supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan. Disamping itu kemandirian mereka perlu dilindungi supaya dapat terpujuk dan terpelihara dengan baik, dan selanjutnya dapat membentuk kedewasaan sikap masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan aspek-aspek untuk memberdayakan masyarakat, aspek yang diperlukan dalam memberdayakan masyarakat menurut Suparjan & Suyatna (2003), yang perlu menjadi inti dasar pemberdayaan yaitu:

- a) Klarifikasi, pengakuan dan perlindungan terhadap posisi masyarakat selaku konsumen produk-produk kebijaksanaan, pemerintahan, dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
- b) Klarifikasi, pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui lembaga/media yang dipandang efektif.
- c) Klarifikasi, pengakuan peningkatan dan perlindungan terhadap *bargaining power* masyarakat yang diperlukan dalam rangka memperjuangkan aspirasinya tersebut melalui berbagai lembaga dan media yang dipandang efektif oleh masyarakat.
- d) Klarifikasi, pengakuan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup agar mampu berperan di dalam perubahan sosial yang semakin cepat di masa depan.

Peneliti menegaskan pengertian pemberdayaan masyarakat adalah proses pemberian daya atau kekuatan (*power*) terhadap perilaku dan potensi individu atau masyarakat, serta pengorganisasian kelompok masyarakat oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri atas dasar partisipasi. Pemberdayaan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memiliki inisiatif untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di sekitarnya agar dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta kondisi diri sendiri menjadi lebih baik. Pemberdayaan memiliki tujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dan

dapat memperbaiki segala aspek, dalam arti memiliki potensi agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar baik pemerintah maupun non pemerintah.

Di dalam pemberdayaan terdapat proses pendidikan, upaya pendidikan merupakan aktivitas yang kompleks, yang melibatkan sejumlah komponen pendidikan yang saling berinteraksi atau interdependensi satu sama lain. Apabila upaya pendidikan hendak dilaksanakan secara terencana dan teratur, maka berbagai komponen dan saling hubungannya perlu dikenali, dikaji dan dikembangkan sehingga mekanisme kerja komponen-komponen itu secara menyeluruh dan terpadu, akan dapat menumbuhkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, pengkajian tentang upaya pendidikan sebagai suatu sistem mempunyai arti penting.

Menurut Siswoyo (2007) tiga komponen sentral dalam upaya pendidikan adalah peserta didik, pendidik dan tujuan pendidikan. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar peserta didik dan pendidik dalam mencapai tujuan pendidikan. Proses pemberdayaan yang di berikan melalui kegiatan pelatihan memiliki komponen yang sama seperti komponen pendidikan, karena pada dasarnya pemberdayaan merupakan usaha memberikan dorongan atau daya berupa pengetahuan atau pendidikan kepada masyarakat agar berdaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Komponen-komponen pendidikan yang vital adalah: tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, isi pendidikan, metode pendidikan, alat pendidikan dan lingkungan pendidikan. Komponen yang dimiliki dalam pemberdayaan melalui bentuk pelatihan ini memiliki tujuan memberikan

ketrampilan, pengetahuan, nilai, sikap, motivasi dan menyejahterakan masyarakat agar kehidupannya menjadi lebih baik secara ekonomi, sosial, budaya dan terlepas dari masalah kemiskinan. Peserta didik yang dimaksud yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan dibelajarkan sebagai warga belajar, selanjutnya pendidik yaitu pengelola, isi pendidikan berupa pelatihan ketrampilan yang didalamnya terdapat materi berupa pelatihan berkaitan dengan PKK dengan jadwal yang telah terperinci, pemasaran dan evaluasi, metode yang dipakai dalam pelatihan yaitu melalui musyawarah dengan masyarakat.

B. Masyarakat Pedesaan

Desa menurut Widjaja (2005) adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (8) ditegaskan bahwa, “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.¹ Bab IX Pasal 78 ayat (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Pedesaan adalah bagian integral dari suatu negara maka berarti kemiskinan, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Menurut Bintarto (Bintarto R 2011) desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di situ (suatu daerah) dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal-balik dengan daerah lain.

Selanjutnya menurut Nurcholis (2011), desa adalah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Dapat di tegaskan, desa adalah suatu daerah yang didiami oleh penduduk dan didalamnya mereka saling bergotong royong dan memiliki suatu sistem kehidupan. ciri-ciri masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut:

1. Di dalam masyarakat pedesaan memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas-batas wilayahnya.
2. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan (*gemeinschaft* atau paguyuban)
3. Sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sambilan atau *part time* yang biasa mengisi waktu luang.
4. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan sebagainya.

Menurut Nurcholis (2011), masyarakat pedesaan identik dengan istilah gotong-royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Kerja bakti itu ada dua macam:

1. Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya dari inisiatif warga masyarakat itu sendiri (biasanya di istilahkan dari bawah).
2. Kerja sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya tidak dari inisiatif warga itu sendiri berasal dari luar (biasanya berasal dari atas).

Menurut Nurcholis (2011), setiap desa memiliki unsur-unsur didalamnya, adapun unsur-unsur desa antara lain adalah:

- a. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya,
- b. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat, dan
- c. Tata kehidupan, dalam hal ini pola pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa.

Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak berdiri sendiri. Selanjutnya, desa memiliki fungsi, yaitu: Pertama, dalam hubungan dengan kota, maka desa yang merupakan "*Hinterland*" atau daerah dukung yang berfungsi sebagai suatu daerah pemberian bahan makanan pokok. Kedua, desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (*raw material*) dan tenaga kerja (*man power*) yang tidak kecil artinya. Ketiga, dari segi kegiatan kerja (*occupation*) desa dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut maka secara singkat ciri-ciri masyarakat pedesaan di Indonesia dapat dinyatakan sebagai berikut:

a. Homogenitas sosial

Bahwa masyarakat desa terdiri dari satu atau beberapa kekerabatan saja, sehingga pola hidup tingkah laku maupun kebudayaan sama atau homogen. Hubungan primer pada masyarakat desa hubungan kekeluargaan dilakukan secara musyawarah.

b. Kontrol sosial yang ketat

Setiap anggota masyarakat saling mengetahui masalah yang dihadapi anggota lain bahkan ikut menyelesaikannya.

c. Gotong royong

Nilai-nilai gotong royong pada masyarakat pedesaan tumbuh dengan subur dan membudaya.

d. Ikatan sosial

Setiap anggota masyarakat pedesaan diikat dengan nilai-nilai adat dan kebudayaan secara ketat.

e. Magis religius

Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat desa sangat mendalam.

f. Pola kehidupan

Masyarakat desa bermata pencaharian di bidang agraris, baik pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di

pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial, ekonomi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:

- a. Akses terhadap sumber daya
- b. Akses terhadap teknologi
- c. Akses terhadap pasar
- d. Akses terhadap sumber pembiayaan

Keempat akses ini, disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya, juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat di desa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama. Tujuan utama dari pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran yang secara bersama-sama mengajak dan memberdayakan masyarakat Desa Talang Mulya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan sebuah bentuk pelatihan. Penelitian ini difokuskan pada Pelatihan di desa yang di berikan pemberdayaan berupa pelatihan yang berkaitan dengan PKK, yaitu Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Padan, Kabupaten Pesawaran.

C. Kesejahteraan Keluarga

1. Pengertian Kesejahteraan

etiap manusia memiliki keinginan untuk sejahtera, sejahtera menunjuk ke suatu keadaan yang serba baik atau suatu kondisi manusia, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Menurut kamus Bahasa Indonesia, sejahtera juga mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari segala macam gangguan. Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, diartikan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Stiglitz (2011) menyatakan bahwa untuk mendefenisikan kesejahteraan, rumusan multidimensi harus digunakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi standar hidup material (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan), kesehatan, pendidikan, aktivitas individu termasuk bekerja, suara politik, dan tata pemerintahan, hubungan dan kekerabatan sosial, lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan), baik yang bersifat ekonomi maupun fisik. Semua dimensi ini menunjukkan kualitas hidup masyarakat dan untuk mengukurnya diperlukan data objektif dan subjektif.

Perumusan konsep kesejahteraan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa keluarga yang dikatakan sejahtera apabila memenuhi kriteria berikut.

- 1) Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial maupun agama;
- 2) Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarga; dan
- 3) Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusuk di samping terpenuhi kebutuhan pokoknya.

Implementasi pemberdayaan terlihat dari upaya pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat dengan memberikan salah satu program pelatihan, pemilihan program ini dipilih karena melihat potensi alam yang bisa dijadikan bahan baku produksi dan Pelatihan PKK sendiri dirasa cukup efektif dan efisien dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Masyarakat miskin dianggap berdaya menurut Moeljarto dalam Prijono (1996) yaitu apabila dia mampu meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonominya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan pengembangan kelembagaan usaha bersama dengan menerapkan prinsip gotong royong, keswadayaan dan partisipasi.

Istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) tidak merujuk pada suatu kondisi yang baku dan tetap. Istilah ini dapat berubah-ubah karena ukuran sejahtera atau tidak sejahtera kadang-kadang berbeda antara satu ahli dengan ahli lainnya. Menurut

Midgley dalam Huda (2009) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi utama: (1) ketika masalah sosial dapat dikelola dengan baik; (2) ketika kebutuhan terpenuhi; dan (3) ketika peluang-peluang terbuka secara maksimal.

Pengertian lain juga dikembangkan dari hasil *Pre-conference Working For The 15th International Conference of Social Welfare* (Sulistiyani, 2004) dalam Huda (2009) yakni: Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, rekreasi, budaya, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi budaya, dan lain sebagainya.

Tertuang dalam Undang-Undang tentang kesejahteraan sosial yang baru di sahkan pada 18 Desember tahun 2008 sebagai pengganti terhadap UU no.6 tahun 1974 juga tentang kesejahteraan sosial. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Dapat dinyatakan bahwa kesejahteraan merupakan usaha untuk memperjuangkan harkat kemanusiaan yang menempatkan manusia secara terhormat sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, kecukupan sandang, pangan, papan, kesehatan keamanan, persaudaraan dan yang lainnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dimulai dari unit terkecil yaitu dari keluarga, keluarga merupakan tahap awal seseorang untuk bersosialisasi. Setiap masyarakat mempunyai sistem sosial yang

terkecil yaitu keluarga. Di mana pun di dunia ini pasti memiliki sebuah instuisi sosial yang disebut keluarga. Menurut Coleman dan Cressey yang dikutip Zastrow dalam Huda (2009) mengatakan yang disebut keluarga adalah sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan atau adopsi, yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga.

Selanjutnya, menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan keluarga sebagai inti terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya (pasal 1 ayat 10 UUD No. 10/1992). Secara implisit dalam batasan ini yang dimaksud dengan anak adalah anak yang belum menikah, apabila ada anak yang sudah menikah dan tinggal bersama suami atau satri atau anaknya, maka yang bersangkutan menjadi keluarga sendiri (keluarga lain) dan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki hubungan serasi, selaras, seimbang antar anggota dengan anggota, antar anggota dengan masyarakat dan lingkungan sosial (pasal 1 ayat 11 UUD No. 10/1992).

Keluarga memiliki fungsi dalam kehidupan, beberapa fungsi keluarga yang dinyatakan oleh Herliany (2009) adalah sebagai berikut: 1) Fungsi biologis, yang memiliki tujuan a) meneruskan keturunan, b) memelihara dan membesarkan anak, c) memenuhi kebutuhan gizi keluarga, d) memelihara dan merawat anggota keluarga; 2) Fungsi psikologis yang bertujuan, a) memberikan kasih sayang dan rasa aman, b) memberikan perhatian diantara anggota keluarga, c) membina

pendewasaan kepribadian anggota keluarga, d) memberikan identitas keluarga; 3) Fungsi sosialisasi, yang bertujuan untuk a) membina sosialisasi pada anak, b) membina norma dan tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, c) meneruskan nilai-nilai keluarga; 4) Fungsi ekonomi, meliputi, a) mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, b) pengaturan dan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, c) menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa yang akan datang; 5) Fungsi pendidikan, meliputi a) menyekolahkan anak untuk memberikan bekal ketrampilan, pengetahuan, dan membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki, b) mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang dalam memenuhi perannya sebagai orang dewasa, c) mendidik anak sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangannya.

Pada upaya menyejahterakan keluarga diperlukan beberapa tahapan, menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sejak tahun 1994 mengembangkan beberapa indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga dengan menggunakan indikator ekonomi, kesehatan gizi, dan sosial. BKKBN mengelompokkan menjadi lima tahapan dan diterjemahkan ke dalam 23 indikator terkait dengan keluarga sejahtera sebagai berikut (BKKBN 2011):

- 1) Keluarga pra sejahtera, keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan, dan kesehatan.
- 2) Keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera I sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana KB,

interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Indikator yang dipergunakan sebagai berikut: a) anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut, b) pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih, c) seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah dan berpergian, d) bagian terluas dari lantai rumah bukan tanah e) bila anak atau anggota keluarga sakit dibawa ke sarana atau petugas kesehatan.

- 3) Keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dapat pula memenuhi kebutuhan sosial psikologinya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya kebutuhan menabung dan memperoleh informasi. Indikator yang digunakan dari lima indikator pada keluarga sejahtera I ditambah dengan sembilan indikator sebagai berikut: f) anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing g) sekurang kurangnya seminggu sekali keluarga menyediakan daging atau telur atau ikan sebagai lauk pauk, h) seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 stel pakaian baru setahun terakhir, i) luas lantai rumah paling kurang 8.0 m² untuk tiap penghuni rumah, j) seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, k) paling kurang satu orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap, seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun bisa membaca tulisan latin, m) seluruh anak berusia 6-15 tahun bersekolah, n) bila anak hidup dengan dua orang atau lebih pada keluarga yang masih PUS

(Pasangan Usia Subur), saat ini mereka memakai kontrasepsi (kecuali bila hamil).

- 4) Keluarga sejahtera III, merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dan kebutuhan sosial psikologisnya serta sekaligus dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, tetapi belum aktif dalam usia kemasyarakatan di lingkungan desa atau wilayahnya. Mereka harus memenuhi persyaratan indikator a sampai dengan n) dan memenuhi syarat indikator o sampai u) sebagai berikut: o) mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama, p) sebagian dari penghasilan dapat disisihkan untuk tabungan keluarga, q) biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan ini dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga, r) ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, s) mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang sekali dalam enam bulan, t) memperoleh berita dengan membaca surat kabar, majalah, mendengarkan radio, atau, menonton televisi u) anggota keluarga mampu mempergunakan sarana transportasi.
- 5) Keluarga sejahtera II plus, keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, kebutuhan sosial psikologinya dan dapat pula memenuhi kebutuhan pengembangannya, serta sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan aktif pula mengikuti gerakan semacam itu dalam masyarakat. Keluarga-keluarga tersebut memenuhi syarat-syarat a sampai dengan u) dan ditambah dua syarat yakni: v) keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan social masyarakat dalam bentuk

materi) kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, atau instansi masyarakat lainnya.

Badan Pusat Statistik menggunakan IPM untuk mengukur capaian pembangunan manusia dengan menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak. Ketiga dimensi dasar tersebut menggambarkan empat komponen dasar kualitas hidup yakni angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah untuk mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok hidup masyarakat yang dapat dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup yang layak.

2. Kriteria Ekonomi Kesejahteraan

Ekonomi kesejahteraan penting untuk dipahami karena ekonomi kesejahteraan berhubungan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Badrudin (2012), berbagai kriteria dari ekonomi kesejahteraan berguna dalam mempertimbangkan suatu kebijaksanaan. Kriteria- kriteria kesejahteraan sebagai berikut.

a. Kriteria Bentham

Jeremy Bentham menyatakan bahwa perbaikan *welfare* akan terjadi apabila tersedia barang-barang dalam jumlah yang semakin banyak. Ini berarti bahwa *welfare* total adalah penjumlahan *utility* dari individu-individu dalam masyarakat. Menurut kriteria ini bila terdapat perubahan positif *welfare* total, berarti

terdapat perbaikan kesejahteraan walaupun sebenarnya dalam perubahan itu terdapat anggota masyarakat atau individu yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Secara implisit kriteria ini mengasumsikan adanya komparasi antaraindividual (*interpersonal comparison*) di antara anggota masyarakat yang menikmati manfaat dengan anggota masyarakat yang menderita kerugian karena adanya perubahan dalam masyarakat yang bersangkutan.

b. Kriteria Cardinal

Menurut kriteria Cardinal pendapatan anggota masyarakat berpengaruh terhadap *utility*. Berlaku *law of diminishing marginal utility*, anggota masyarakat yang berpendapatan tinggi (memiliki uang lebih banyak) akan memperoleh *marginal utility* yang lebih kecil dibandingkan dengan anggota masyarakat yang berpendapatan rendah (memiliki uang yang lebih sedikit). Dengan demikian, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Maksimum kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila distribusi pendapatan merata di antara anggota masyarakat. Kriteria ini mengasumsikan bahwa *marginal utility* uang adalah sama bagi setiap anggota masyarakat.

c. Kriteria Pareto-Optimal

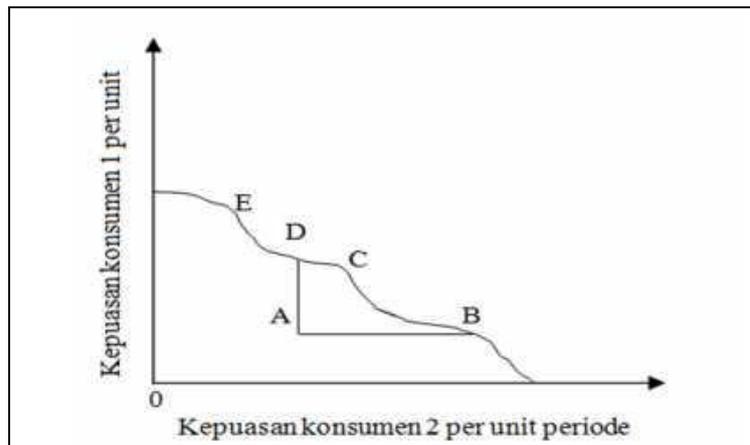
Pareto Optimality merupakan kriteria efisiensi (efisiensi alokatif) yang dicetuskan oleh seorang sosiolog dan ekonom Italy yang bernama V. Pareto. Kriteria Pareto ini menyatakan bahwa efisiensi alokatif akan terjadi bila tidak mungkin lagi dilakukan re-organisasi produksi sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak (yang terlibat dalam kegiatan ekonomi: produsen dan konsumen) merasa lebih sejahtera (*better off*). Oleh karena itu, pada keadaan efisiensi alokatif

ini *utility* (kepuasan) seseorang dapat ditingkatkan hanya dengan menurunkan *utility* orang lain. Contoh keadaan tidak efisien adalah masyarakat yang tidak memanfaatkan sepenuhnya batas kemungkinan produksinya. Dengan lebih dimanfaatkan batas kemungkinan produksinya itu, tidak akan ada orang yang mengalami penurunan utilitas. Cara lain untuk memahami konsep efisiensi ini adalah kaitannya dengan perdagangan. Misalnya, orang membawa hasil produksinya ke pasar untuk ditukarkan dengan barang orang lain. Setiap kali terjadi perutukan (perdagangan), maka utilitas kedua pihak akan naik. Jika semua kemungkinan pertukaran yang menguntungkan telah habis sehingga tidak ada lagi kenaikan utilitas, maka dapat dikatakan bahwa keadaan telah mencapai efisien.

d. Kriteria Kaldor-Hicks

Kaldor Hicks menyarankan pendekatan kompensasi untuk menilai suatu perubahan, yaitu menilai keuntungan dari mereka yang menikmati perbaikan dan menilai kerugian dari mereka yang menderita kerugian dengan satuan uang. Ini berarti untuk mengukur peningkatan kemakmuran masyarakat menurut Kaldor Hicks kemakmuran masyarakat meningkat apabila orang yang memperoleh manfaat dari kebijakan publik/pembangunan (*who gain*) membantu orang lain yang dirugikan (*who lose*) sehingga tidak ada orang lain yang bertambah miskin apabila ada orang yang bertambah kaya. Kriteria Kaldor Hicks ditunjukkan dengan gambar sebagai berikut.

Gambar 2.2
Kriteria Kaldor Hicks



Sumber : Miller dan Meiners, 2000

Berdasarkan Gambar 2.1 dapat dipahami beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Diperoleh sebuah kurva UPF (*Utility Possibility Frontiers*), yaitu kurva batas-batas kemungkinan kepuasan.
- 2) Misalkan, perekonomian mula-mula berada di titik A, setiap pergerakan diharapkan menuju titik B atau D karena pergerakan itu meningkatkan kesejahteraan salah satu konsumen tanpa merugikan konsumen lainnya. Akan tetapi bila bergerak ke titik E, sementara salah satu pihak untung, yang lain dirugikan. Menurut Kaldor Hicks, pergerakan ke titik E itu sebenarnya tidak menguntungkan karena pihak yang untung akan mengimbangi kerugian pihak lain. Atau dengan kata lain, menurut Kaldor Hicks bila E tercapai, akan terjadi redistribusi pendapatan atau kekayaan yang akan menggerakkan perekonomian secara keseluruhan ke titik C, dimana setiap orang dalam perekonomian diuntungkan.
- 3) Kriteria Kaldor Hicks, setiap titik pada UPF menguntungkan dan lebih baik dari titik mana pun yang berada di bawah UPF (misal di titik A).
- 4) Konsumen 1 (yang untung) akan selalu mengimbangi kerugian konsumen

2, lewat pembayaran uang secara langsung (potensi imbalan atau kompensasi).

Kriteria Kaldor Hicks menyatakan bahwa suatu perubahan merupakan perbaikan jika pelaku ekonomi (agen ekonomi) yang beruntung dari adanya perubahan dapat membayar ganti rugi kepada pelaku ekonomi (agen ekonomi) yang menderita kerugian dan besarnya keuntungan yang diperoleh adalah lebih besar daripada ganti rugi yang dibayarkan. Menurut Kaldor Hicks, perubahan ke arah perbaikan menunjukkan bahwa berbagai kombinasi utilitas antara pelaku ekonomi A (konsumen 1) dan pelaku ekonomi B (konsumen 2) yang terdapat pada kurva (Gambar 2.2) kemungkinan utilitas dapat diperoleh dengan jalan pendistribusian kembali (redistribusi) pendapatan dalam perekonomian dengan menggunakan pajak sekaligus (*lumpsum tax*) atau subsidi.

e. Kriteria Ganda Scitovsky

Menurut Scitovsky, kriteria Kaldor Hicks menunjukkan adanya kelemahan karena pada kurva kemungkinan utilitas, yaitu utilitas pelaku ekonomi A (konsumen 1) (U_1U_1) dan utilitas pelaku ekonomi B (konsumen 2) (U_2U_2), bahwa perubahan dari suatu aktivitas (E) ke aktivitas lain (A) merupakan perbaikan, karena penambahan dari suatu aktivitas yang lain (B) melebihi pengurangan utilitas aktivitas (A). Hal ini terjadi karena aktivitas $B > A$, sedangkan aktivitas B mempunyai kedudukan yang sama dengan aktivitas E (dalam hal ini terletak pada kurva kemungkinan utilitas yang sama, yaitu U_1U_1). Dengan demikian, perubahan kembali dari utilitas aktivitas ekonomi (A) ke utilitas aktivitas ekonomi (E) merupakan perbaikan juga. Hal inilah yang merupakan kelemahan

Kaldor Hicks.

Bila kaum ekonom menganggap peran kebijaksanaan ekonomi adalah mempertahankan pekerjaan (*employment*) dan stabilitas harga (*price stability*), maka tugas negara adalah mengobati kelemahan yang ada pada *competition* demi menjamin *welfare*. Negara menurut Scitovsky harus menyediakan jasa-jasa yang bermanfaat bagi masyarakat secara kolektif. Scitovsky mendukung *anti-trust* legislation dan menolak *aggressive competition*, yang bertujuan menegakkan monopoli. Namun, pada dasarnya Scitovsky tetap berkecenderungan memihak orde kompetisi dan menghendaki pembatasan terhadap kontrol negara. Scitovsky menutupi beberapa kelemahan kriteria Kaldor Hicks dengan mengusulkan uji ganda yang lebih ketat, yaitu menggunakan kriteria Kaldor Hicks untuk menentukan apakah perubahan dari titik asal ke titik baru merupakan suatu perbaikan, dan menggunakan kriteris Kaldor Hicks untuk menentukan apakah perubahan kembali dari titik baru ke titik lama bukan merupakan perbaikan pula.

Menurut Badrudin (2012), pada kenyataannya penggunaan kriteria Pareto sangat terbatas untuk diterapkan karena memiliki kelemahan yang mendasar, misalnya sebagai berikut:

- 1) Tidak berlaku pada kasus suatu perubahan yang menguntungkan beberapa orang, tetapi juga merugikan orang lain. Walaupun besarnya keuntungan lebih besar jika dibandingkan dengan besar kerugian, menurut pareto perubahan tersebut bukanlah suatu perbaikan. Dengan demikian kriteria pareto tidak dapat menentukan mana yang lebih baik.

- 2) Berkaitan dengan distribusi pendapatan, tidak menumbuhkan alokasi yang memadai, sebagai contoh banyak individu yang menerima pendapatan rendah.
- 3) Dalam kenyataannya sistem yang kompetitif sempurna tidak pernah ada. Dengan demikian untuk mengukur peningkatan kemakmuran masyarakat menggunakan kriteria pareto optimal apabila paling sedikit satu orang bertambah makmur (*better off*) dengan tidak menyebabkan orang lain bertambah miskin (*worse off*).

Berbagai kriteria di atas memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Kritik yang cukup tajam terhadap kriteria Kaldor Hicks dari pakar-pakar ekonomi terjadi karena pada kenyataannya ganti rugi tidak perlu dibayarkan kepada penerima kerugian. Ganti rugi pada kriteria Kaldor Hicks adalah ganti rugi yang potensial bukan ganti rugi aktual. Tanpa pembayaran ganti rugi yang aktual perlu digunakan pertimbangan nilai (*value judgement*) untuk menyatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat menjadi lebih baik dengan adanya perubahan. Kedua kriteria Kaldor-Hicks dan Scitovsky di kritik oleh Boumol, karena keduanya menggunakan nilai uang sebagai ukuran besarnya utilitas. Padahal uang mempunyai nilai yang relatif tergantung atas kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

Berdasarkan konsep Boumol tersebut, maka Bergson telah memperkenalkan kriteria yang lain, yaitu fungsi kesejahteraan sosial (*social welfare function*). Bergson menyatakan bahwa penilaian tentang perubahan hanya dapat dilakukan jika masyarakat mempunyai fungsi kesejahteraan sosial, yang menyatakan bagaimana kebijakan masyarakat tergantung kepada kesejahteraan tiap-tiap anggotanya. Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menyatakan dalam

bentuk yang tepat pertimbangan nilai yang diperlukan untuk derivasi kondisi kesejahteraan ekonomi maksimal. Fungsi ini bernilai riil dan terdeferensialkan. Argumen fungsi, termasuk jumlah komoditas yang berbeda diproduksi dan dikonsumsi dan sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan komoditas yang berbeda, termasuk tenaga kerja.

Menurut Badrudin (2012), nilai fungsi maksimum memerlukan kondisi umum sebagai berikut.

- a) Kesejahteraan marginal sama untuk setiap individu dan setiap komoditas.
- b) Marginal setiap nilai uang dihasilkan dari kerja sama setiap komoditas yang dihasilkan dari setiap masukan tenaga kerja.
- c) Marginal biaya setiap unit sumber daya adalah sama dengan nilai produktivitas marginal untuk setiap komoditas.

Bergson menggambarkan sebuah peningkatan kesejahteraan ekonomi yang kemudian disebut perbaikan Pareto. Setidak-tidaknya satu orang pindah ke posisi yang lebih disukai dengan orang lain acuh tak acuh. Fungsi Bergson dapat memperoleh Pareto Optimal yang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk mendefinisikan *ekuitas normative interpersonal*.

3. Pengukuran Kesejahteraan

Kesejahteraan memiliki banyak dimensi, yakni dapat dilihat dari dimensi materi dan dimensi non materi. Sisi materi dapat diukur dengan pendekatan pendapatan dan konsumsi. Mayer dan Sullivan (2002) menyatakan bahwa secara konseptual dan ekonomi data konsumsi lebih tepat digunakan untuk mengukur kesejahteraan dibandingkan dengan data pendapatan karena data konsumsi merupakan

pengukuran yang lebih langsung dari kesejahteraan. Kesejahteraan dari dimensi non materi dapat dilihat dari sisi pendidikan dan kesehatan. Pengukuran status kesehatan dapat dilakukan melalui pertanyaan tentang pengukuran kesehatan secara umum, penyakit berdasarkan pelaporan responden dan pengukuran secara medis, pengobatan yang dijalani, aktivitas fisik, hubungan sosial dan kesehatan psikologi/mental/emosional seperti tentang sulit tidur, perasaan takut/gelisah, dan pertanyaan tentang kebahagiaan (Easterlin, 2001).

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di antaranya adalah menurut kriteria Badan Pusat Statistik (BPS), yakni menggunakan kriteria yang didasarkan pada pengeluaran konsumsi rumah tangga, baik pangan maupun non pangan (pendekatan kemiskinan). Disamping itu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam pendekatan kesejahteraan mengukur tingkat kesejahteraan keluarga dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan keluarga Sejahtera Plus (KS III Plus) (BPS, 2008).

Selanjutnya Cahyat dkk (2007) dari lembaga CIFOR (*Center for International Forestry Research*) melakukan pemantauan kesejahteraan dengan mengambil kasus Kutai Barat Kalimantan Timur menemukan bahwa kesejahteraan diukur dengan kriteria (1) kesejahteraan subjektif; (2) kesejahteraan dasar yang dibagi menjadi tiga indeks, yaitu kesehatan dan gizi, kekayaan materi, dan pengetahuan; (3) lingkungan pendukung yang antara lain lingkungan alam, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan politik, dan infrastruktur serta pelayanan.

Stiglitz (2011) menyatakan bahwa untuk mendefinisikan kesejahteraan, rumusan multidimensi harus digunakan. Dimensi-dimensi pokok yang harus diperhitungkan adalah (1) standar hidup materiil (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan); (2) kesehatan; (3) pendidikan; (4) aktivitas individu, termasuk bekerja; (5) suara politik dan tata pemerintahan; (6) hubungan dan kekerabatan sosial; (7) lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan); dan (8) ketidaknyamanan, baik yang bersifat ekonomi maupun fisik. Semua dimensi tersebut menunjukkan kualitas hidup masyarakat dan untuk mengukurnya diperlukan data objektif dan subjektif. Indikator-indikator objektif kesejahteraan seperti Indeks Pembangunan Manusia.

D. Kemiskinan

Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berlalunya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Mikelsen, 2003:194). Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya (Soegijoko,1997).

Kemiskinan sering dianalogkan dengan semua sifat kekurangan dan ketidakberdayaan. Analog ini mengakibatkan definisi kemiskinan menjadi sangat luas sehingga sulit untuk memahaminya dan kesulitan untuk menentukan langkah kebijakan yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan dapat didefinisikan dalam berbagai versi. Ada batasan sederhana yang mengkaitkan kemiskinan dengan standar minimal yang dihitung berdasarkan pendapatan (*income based poverty line*). Mereka yang dinyatakan miskin adalah

individu, rumah tangga, masyarakat, atau kelompok sosial lainnya yang memperoleh pendapatan dibawah standar minimal. Batasan ini mengabaikan sumber daya tunai (*non cash*) yang tersedia di masyarakat dan sulit digunakan dalam situasi setempat yang terbatas (Padmowihardjo, 2004).

Kemiskinan diartikan sebagai ketidak mampuan berpartisipasi dalam bermasyarakat secara ekonomi, sosial budaya dan politik. Pengertian ini melihat kemiskinan bersipat multidemensi yang mencakup kemiskinan insani dan martabat, konsep kemiskinan multidemensi melihat kemiskinan menjadi berapa katagori yaitu kemiskinan pendapatan, kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, ketimpangan struktur usaha, ketidakberdayaan, penyandang masalah kesejahtraan sosial, ketimpangan gender dan kesenjangan antar golongan dan wilayah (Mustofa, 2005).

Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang, baik laki laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN). Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial yang meliputi: aset, sumber-sumber keuangan, organisasi dan jaringan sosial, pengetahuan dan informasi untuk memperoleh pekerjaan menjadikan seseorang menjadi miskin (Friedman, 1979 dalam Ridlo, 2001).

Definisi kemiskinan dapat ditinjau dari tinjauan ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi kemiskinan adalah kekurangan sumber daya yang dapat

digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara sosial kemiskinan diartikan kekurangan jaringan sosial dan struktur untuk mendapatkan kesempatan kesempatan meningkatkan produktivitas. Sedangkan secara politik kemiskinan diartikan kekurangan akses terhadap kekuasaan (Effendi, 1993).

Tinjauan yang sama dengan dengan penjelasan berbeda dikemukakan Nugroho dan Dahuri (2004) dari aspek ekonomi, kemiskinan merupakan kesenjangan antara lemahnya daya pembelian (positif) dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar (normatif). Dari aspek sosial, kemiskinan mengindikasikan potensi perkembangan masyarakat yang rendah. Sedangkan dari aspek politik, kemiskinan berhubungan dengan rendahnya kemandirian masyarakat. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (2003) memberikan definisi kemiskinan dengan basis keluarga. Keluarga yang termasuk kategori miskin adalah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Sedangkan Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal tetapi belum memenuhi seluruh kebutuhan sosio psikologinya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga dan lingkungan dan transportasi.

E. Pelatihan Keterampilan

Pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Mulya dilakukan dengan memberikan suatu pelatihan ketrampilan tentang PKK merupakan proses pemberian pengetahuan atau ketrampilan agar tercapainya suatu tujuan yang

diharapkan dalam kurun waktu tertentu. Pelatihan adalah proses melatih, kegiatan atau pekerjaan (KBBI edisi 2, Balai Pustaka).

Menurut Martoyo (2009) pengertian pelatihan adalah suatu pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir dimana para karyawan non-manajerial mempelajari pengetahuan dan ketrampilan teknis dalam tujuan terbatas. Selanjutnya, itu menurut Yusuf (2008) mengungkapkan bahwa pelatihan lebih berorientasi pada pekerjaan saat ini untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan tertentu.

Menurut Hamalik (2007) pelatihan juga diberikan dalam bentuk bantuan. Bantuan dalam hal ini dapat berupa pengarahan, bimbingan, fasilitas, penyampaian informasi, latihan keterampilan, pengorganisasian suatu lingkungan belajar, yang pada dasarnya peserta telah memiliki potensi dan pengalaman, motivasi untuk melaksanakan sendiri kegiatan latihan dan memperbaiki dirinya sehingga dia mampu membantu dirinya sendiri.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat peneliti menegaskan bahwa pelatihan adalah pemberian suatu kegiatan yang berisi pengetahuan, ketrampilan, informasi untuk dapat merubah kehidupan seseorang ke arah yang lebih baik.

Menurut Sulistyani (2004) adapun tujuan pelatihan yaitu:

- a. Memperbaiki kinerja.
- b. Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi.
- c. Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi kompeten.
- d. Membantu memecahkan persoalan operasional.
- e. Mempersiapkan karyawan untuk promosi.

f. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi.

Tujuan dan sasaran pelatihan harus jelas dan dapat diukur. Menurut Mangkunegara (2009) tujuan dan pelatihan yaitu:

- a. Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi.
- b. Meningkatkan produktivitas kerja.
- c. Meningkatkan kualitas kerja.
- d. Meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja.
- f. Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara maksimal.
- g. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja.
- h. Menghindarkan keusangan (*obsolescence*).
- i. Meningkatkan perkembangan pegawai.

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, dinyatakan bahwa pada intinya tujuan pelatihan yaitu meningkatkan kemampuan para karyawan atau yang diberi pelatihan baik secara sikap, pengetahuan maupun perilakunya serta mempersiapkan seseorang dalam perubahan yang akan datang untuk tujuan ke arah yang lebih baik. Pelatihan dan penelitian ini adalah dimaksud yaitu pelatihan keterampilan kepada masyarakat Desa Talang Mulya tentang pelatihan PKK yang kemudian dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian serta harga produk petani yang dihasilkan di daerah tersebut dapat bersaing dengan harga diluar sana, dengan adanya pelatihan tersebut masyarakat tidak perlu khawatir dengan harga jual yang cukup tinggi dan pelatihan pemasaran, pemerintah bersama masyarakat berupaya memberikan kegiatan

pemberdayaan agar tercapai suatu keadaan masyarakat yang sejahtera dan terpenuhi segala kebutuhannya.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian oleh Purbasari (2012) mengenai “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ternak Kelinci di Balai Belajar Bersama Hj. Mudikrah Desa Pagersari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal”. Dengan tujuan: Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui program ternak kelinci, dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program ternak kelinci. Berdasarkan analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program ternak kelinci dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelatihan pelaksanaan dalam program ternak kelinci ini dapat memberdayakan masyarakat kemudian dijadikan sebagai sumber penghasilan oleh warga masyarakat. Faktor pendukung yaitu: respon positif masyarakat, adanya dukungan dari dinas pendidikan dan peternakan, adanya kerjasama dari berbagai instansi pemerintah dan potensi alam yang memadai. Faktor penghambat: kurangnya pengetahuan warga belajar tentang penanggulangan cuaca yang ekstrem.

Penelitian relevan yang lain yang dilakukan oleh Puspita Sari (2012) mengenai “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Objek Wisata oleh Kelompok Sadar Wisata Dewabejo di Desa Bejoharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul”. Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu: 1). Untuk mendeskripsikan program Kelompok Sadar Wisata Dewabejo dalam mengembangkan objek wisata sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. 2). Wisata sebagai upaya

pemberdayaan masyarakat. 3). Mendeskripsikan bentuk pemberdayaan dan perubahan yang ada di masyarakat dengan adanya kelompok sadar wisata Dewabejo. 4). Faktor pendukung dan penghambat proses pengembangan objek wisata. Hasil penelitian ini menunjukkan: Program yang dilakukan kelompok sadar wisata dalam mengembangkan objek wisata sebagai usaha pemberdayaan masyarakat diantaranya pelatihan manajemen organisasi, pelatihan *standart operating procedure*, pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan bahasa dan kepemimpinan, tata masyarakat yang baik. Kontribusi Kelompok Sadar Wisata Dewabejo dalam mengembangkan objek wisata sebagai upaya pemberdayaan masyarakat meliputi pemberian penyedia fasilitas akomodasi dan meningkatkan inisiatif sumbangsih dalam menciptakan iklim kondusif bagi pariwisata. Bentuk pemberdayaan masyarakat meliputi: filosofi hidup, sikap, pendidikan, ketrampilan, adat dan penampilan. Faktor pendorong yaitu semangat motivasi anggota dan pengurus Kelompok Sadar Wisata Dewabejo. Faktor penghambat yaitu kecemburuan sosial diantara masyarakat. Berdasarkan penelitian tersebut maka penelitian ini akan lebih memfokuskan pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan, dan ekonomi di Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

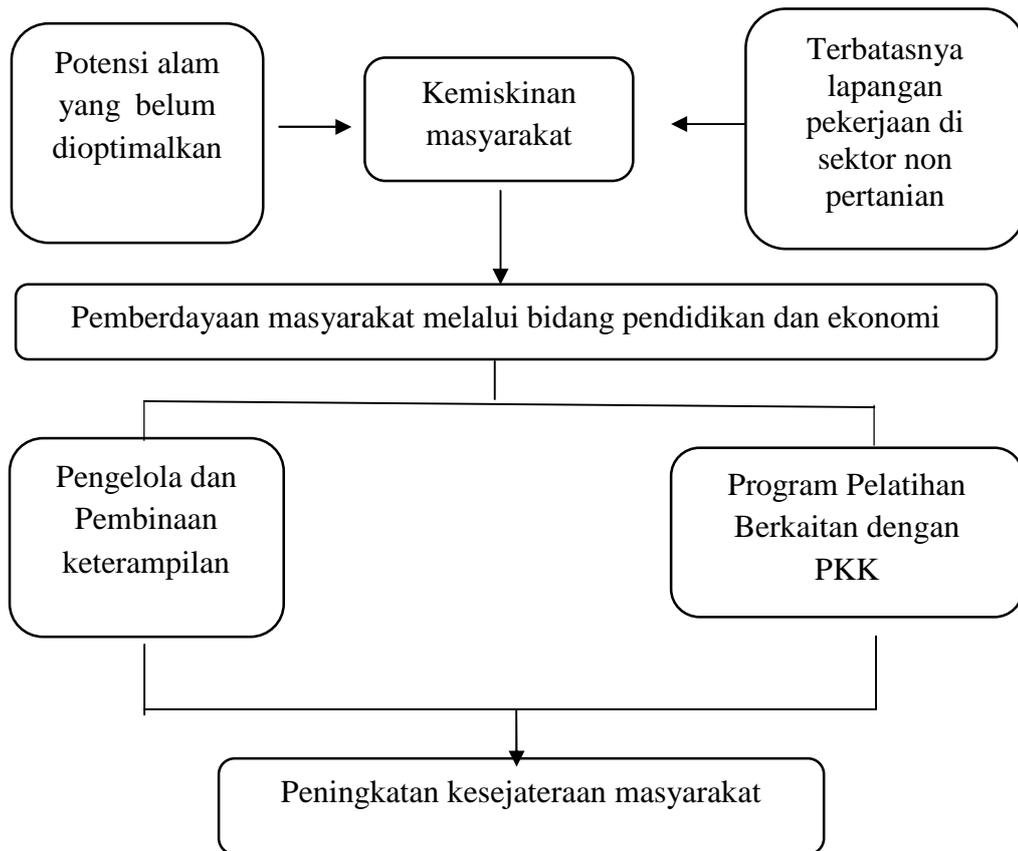
G. Kerangka Berpikir

Penduduk Indonesia sebagian besar tinggal dan menetap di pedesaan yang memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, berbicara tentang pedesaan dapat diidentifikasi dengan permasalahan kemiskinan. Kenyataannya sebagian besar

masyarakat tinggal di pedesaan memiliki kehidupan yang belum mendapat kesejahteraan atau pas-pasan. Bidang pertanian bagi masyarakat merupakan satu-satunya lahan untuk mendapatkan sumber penghasilan. Dengan demikian lapangan pekerjaan di desa sangat terbatas untuk menampung jumlah tenaga kerja yang semakin meningkat. Kondisi-kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kualitas SDM masyarakat, sempitnya lapangan kerja di pedesaan yang berorientasi pada pertanian, terbatasnya lapangan pekerjaan di non sektor pertanian hal ini yang menyebabkan terjadinya urbanisasi, akibatnya desa kurang berkembang dalam memanfaatkan potensi alamnya, padahal potensi yang dimiliki oleh desa tersebut bisa merubah kehidupan yang lebih baik jika dimanfaatkan dengan tepat.

Desa Talang Mulya, memiliki potensi alam yang bisa dimanfaatkan tetapi masyarakat belum bisa mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga menyebabkan terbatasnya pekerjaan di non sektor pertanian dan berdampak pada kemiskinan masyarakat, melihat keadaan tersebut peneliti berupaya memberikan pemberdayaan dalam bentuk pelatihan. tujuannya adalah agar masyarakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui program-program pemberdayaan dengan mengandalkan potensi yang dimiliki. diharapkan melalui program yang diberikan berupa pelatihan ketrampilan berkaitan dengan PKK dan dikembangkan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan pelatihan pemasaran melalui tahap persiapan, pelaksanaan, selanjutnya evaluasi dari kegiatan tersebut akhirnya membawa masyarakat yang berdaya, sejahtera dan dapat meningkatkan partisipasi dan pendapatan masyarakat dari segi perekonomiannya, salah satu wujud nyata dari penerapan Pengelolaan dan

pembinaan keterampilan yaitu dibentuk suatu program pelatihan PKK di Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Dapat digambarkan kerangka berpikir penelitian, sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Usman dan Akbar (2009:) menyebutkan bahwa metode penelitian merupakan suatu pengajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Selanjutnya tipe penelitian merupakan cara utama yang di gunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu. Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Nazir (2005) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki maka tujuan dilakukannya penelitian deskriptif ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan, dan ekonomi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Talang Mulya, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Alasan dipilihnya lokasi dalam

penelitian ini dikarenakan letaknya dapat dijangkau oleh peneliti dan di Desa Talang Mulya yang merupakan desa tertinggal ialah kurangnya pemberdayaan dan pembinaan, yang menyebabkan banyak potensi desa yang belum dapat dikelola secara maksimal. Kesadaran masyarakat akan pendidikan juga masih rendah.

C. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2006) Fokus penelitian sangat penting dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Fokus penelitian merupakan batasan masalah dalam penelitian kualitatif yang masih bersifat sementara dan akan berkembang atau berubah setelah peneliti turun ke lapangan. Fokus penelitian sangat penting sebab fokus akan membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan dan menunjang peranan penting dalam memadukan serta mengarahkan jalannya penelitian. Dengan fokus penelitian dapat menghindari pengumpulan data yang sembarangan dan hadirnya data yang melimpah, maka penelitian membuat Fokus penelitian dengan mengemukakan:

Pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan dan ekonomi :

- a) Masih rendahnya kondisi kesejahteraan keluarga
- b) Terbatasnya lapangan pekerjaan disektor non pertanian
- c) Adanya sumber daya alam yang tersedia berupa penghasil buah-buahan, tetapi kurang dimanfaatkan oleh masyarakat.
- d) Tidak adanya pendamping desa

- e) Masih rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan dan pembinaan keterampilan

D. Sumber-Sumber Data

Sumber-sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber-sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari pengalaman, pemahaman, dan pengetahuan dari individu-individu yang dipilih menjadi informan sebagai representasi (keterwakilan) informasi mikro objek penelitian. Dengan demikian sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari Ketua PKK, Sekretaris PKK, Bendahara PKK, 2 Anggota PKK yang Aktif, dan 2 Aparatur Desa yang paling memenuhi syarat yang mengetahui tentang PKK.

Selanjutnya, sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen lain, baik berupa buku-buku, tulisan-tulisan disurat kabar atau majalah, atau hasil penelitian lain, yang memiliki korelasi signifikan dengan objek penelitian.

E. Teknik Sampling

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Gary D. (1993) yang berarti pada *purposive sampling*, peneliti mempercayai bahwa mereka dapat menggunakan pertimbangannya atau intuisinya untuk memilih orang-orang atau kelompok terbaik untuk dipelajari atau dalam hal ini memberikan informasi yang akurat. *purposive sampling* memiliki ciri-ciri tertentu, cirinya adalah orang-orang yang mengetahui kegiatan PKK antara lain :

1. Ketua PKK
2. Bendahara PKK
3. Dua (2) Anggota PKK yang Aktif
4. Aparatur Desa yang paling memenuhi syarat yang mengetahui tentang PKK

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi. Menurut Milles & Huberman (1992) teknik triangulasi adalah suatu teknik yang menghubungkan berbagai bentuk situasi pikiran, fenomena-fenomena, informasi-informasi atau temuan-temuan lapangan dari sumber-sumber informan yang berbeda, tetapi memiliki hubungan kausalitas serta terkait secara signifikan dan linier dengan objek penelitian.

Adapun beberapa teknik pendukung lainnya dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1) Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengambilan data yang sistematis dan teliti dalam mencari jawaban suatu masalah yaitu dengan jalan mengamati dan meneliti secara langsung pada objek penelitian. Observasi dilakukan pada saat penelitian ini berlangsung, lokasi yang diobservasi adalah Desa Talang Mulya, berbagai peran masyarakat, serta pengamatan dari hasil wawancara. Observasi didukung dengan dokumentasi berupa foto-foto lokasi yang diobservasi.

2) Wawancara

Teknik wawancara ini dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kesiapan masyarakat dan potensi Desa Wisata Talang Mulya untuk

pengembangannya. Wawancara ini akan dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu:

- a) Wawancara mendalam, yaitu dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dengan sumber-sumber informasi dari Ketua PKK, Sekretaris PKK, Bendahara PKK, 2 Anggota PKK yang Aktif, dan 2 Aparatur Desa yang paling memenuhi syarat yang mengetahui tentang PKK. secara terbuka dan mendalam, agar informan dapat memberi informasi secara bebas.
- b) Wawancara terstruktur, yaitu melakukan tanya jawab dengan menggunakan panduan pertanyaan yang dibuat secara terstruktur, dan dilakukan terhadap sumber-sumber informasi yang berasal dari pemerintahan Desa Talang Mulya.

3) Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung data, penggunaan dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data agar data yang disajikan lengkap. Alat dokumentasi yang digunakan berupa:

- a) Alat perekam suara, digunakan pada saat wawancara berlangsung agar data yang disajikan benar-benar lengkap dan sebagai bukti pelaksanaan wawancara.
- b) Kamera, digunakan pada saat observasi untuk mendokumentasikan hasil penelitian dan sebagai data pendukung hasil penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Untuk melakukan analisis atas fakta-fakta yang ditemukan dilapangan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Reduksi data, yaitu melakukan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan pentransformasikan data-data yang diperoleh, kemudian ditemukan data-data yang berkorelasi secara signifikan dengan objek penelitian melalui pengklasifikasian
- 2) Penyajian data, yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang kompleks kedalam kesatuan bentuk (*gestalt*) yang disederhanakan, selektif dan menggunakan konfigurasi yang mudah dipahami, untuk kepentingan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- 3) Penarikan kesimpulan, yaitu menarik suatu kesimpulan dari konfigurasi data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan akhir tidak terlepas dari kesimpulan-kesimpulan yang senantiasa dilakukan sejak awal hingga akhir pengumpulan data.

H. Teknik Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu teknik keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui teknik keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Keabsahan penelitian ini dinilai dari triangulasi. Triangulasi menurut Moleong (2007) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai

pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-*Recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan :

- 1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
- 2) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data,
- 3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Triangulasi dalam penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara kepada informan atau narasumber yang menjadi subjek penelitian dengan objek penelitian, kemudian dibuktikan dengan pengamatan peneliti di lapangan dan dikuatkan melalui dokumen atau arsip tertulis.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Talang Mulya

Desa Talang Mulya adalah Desa pemekaran dari Desa Induk Hurun yang terletak dipinggir hutan kawasan register 19 Gunung Betung, penduduk Desa Talang Mulya terdiri dari beberapa masyarakat pendatang daerah di Jawa Barat Jawa Tengah, Jawa Timur dan Palembang. Pada tahun 1940 Desa Talang Mulya bernama Kampung Tebah Hawi yang berasal dari bahasa Lampung dengan penghuni sejumlah 9 KK dan 19 jiwa, kemudian pada tahun 1960 penduduk bertambah sejumlah 120 Kepala Keluarga. Pada tahun 1962 kampung Tebah Hawi berubah menjadi kampung/Dusun Talang Mulya yang diambil dari bahasa sunda.

Pada tahun 2012 Dusun Talang Mulya dimekarkan dari desa induk Hurun menjadi Desa Talang Mulya, dengan jumlah penduduk 338 KK dan 1340 jiwa. Desa Talang Mulya terdiri dari beberapa kampung kecil yaitu kampung Talang Mulya, Talang Baru, Talang Tengah, Daya Bakti dan Umbul Lapang.

Pada tahun 2012 Pak Salim menjabat Pj Kepala Desa dan Sdr. Mardianto, A. Md. sebagai Sekdes Talang Mulya sampai tahun 2014 dan pada tahun 2015 diadakan pemilihan kepala Desa dengan 2 calon kepala desa dan dimenangkan oleh Sdr Salim sebagai kepala desa terpilih periode tahun 2015-2020.

B. Kondisi Geografis

Desa Talang Mulya memiliki luas wilayah 1.772,5 ha dengan lahan produktif 100ha dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tata Guna Tanah

No	Tata Guna Tanah	Luas (ha/m ²)
1	Luas pemukiman	125
2	Luas persawahan	5
3	Luas Perkebunan	100
4	Luas kuburan,Jalan dll	2
5	Perkantoran	1
Luas total		233

Sumber : Data Umum Desa Talang Mulya (2017)

Letak Desa Talang Mulya berada di sekitar kawasan hutan, jarak dari Desa Talang Mulya ke ibu kota Kecamatan sekitar 19 km, jarak ke ibu kota Kabupaten 30 km. dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Hutan Register 19 Gunung Betung
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Sukarame II Kecamatan Teluk Betung Barat
- c. Sebelah Selatan : Desa Tanjung Agung Kecamatan
- d. Sebelah Barat : Hutan Register 19 Gunung Betung

C. Kondisi Perekonomian

Jumlah penduduk Desa Talang Mulya Sebanyak 1500 jiwa dengan penduduk usia produktif 1000 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 200 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah bertani sedangkan hasil produksi ekonomis desa yang menonjol adalah pertanian

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk

No	Penduduk	Jumlah (orang)
1	Jumlah Laki-Laki	780
2	Jumlah Perempuan	720
Jumlah Total		1500

Sumber : Data Umum Desa Talang Mulya (2017)

Tabel 4.3 Jumlah Kepala Keluarga

No	Penduduk	Terdiri dari
1	Jumlah Kepala Keluarga	500 KK
2	Jumlah RT	9 RT
3	Jumlah Dusun	3 RW
4	Kepadatan Penduduk	0,5 per km

Sumber : Data Umum Desa Talang Mulya (2017)

Tabel 4.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Talang Mulya

No	Jenis pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Petani	300	200
2	Buruh Tani	100	100
3	Pedagang keliling	6	5
5	Peternakan	10	10
6	Nelayan	0	0
7	Bidan swasta	1	0
8	Pengusaha kecil dan menengah	40	10
9	Karyawan Perusahaan swasta	30	20
10	Belum Bekerja	50	30
11	Tidak Bekerja	60	20
Jumlah		780	720

Sumber : Data Umum Desa Talang Mulya (2017)

D. Kondisi Sosial Budaya

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (Orang)
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	30	20
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	25	25
3	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	100	100
4	18-56 tahun tidak pernah sekolah	10	15
5	Tamat SD/ sederajat	200	300
6	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	10	10
7	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	15	15
8	Tamat SMP/ sederajat	50	30
9	Tamat SMA/ sederajat	25	20
10	Tamat D-2/ sederajat	1	0
111	Tamat S-1/ sederajat	5	3
Jumlah		780	720

Sumber : Data Umum Desa Talang Mulya (2017)

E. Kondisi Sarana Dan Prasana

Desa Talang Mulya memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Talang Mulya mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Suku (Rukun Warga) dan Suku membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa Talang Mulya mempunyai 3 Suku dan 9 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Talang Mulya mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincinan:

Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa
				Pemerintah	Swasta	Lain- lain		
1	TK	1	–	–	V	–	4	50
2	SD / Sederajat	1	V	V	–	–	10	200

Sumber : Data Umum Desa Talang Mulya (2017)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan formal yang ada di Desa Talang Mulya hanya setingkat SD sedangkan untuk pendidikan SMP dan SMA tidak ada, hal ini disebabkan ketidakmampuan masyarakat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau kondisi ekonomi yang kurang.

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di Desa Talang Mulya mempunyai PKD di tingkat Desa dengan satu orang bidan desa dan posyandu di tiap dusun masing-masing mempunyai 1 (satu) pos. Tenaga kesehatan di Desa Talang Mulya terdiri dari dukun bersalin terlatih sebanyak 5 orang dan 1 orang bidan.

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Talang Mulya mempunyai masjid sebanyak 3 buah dan mushola di tiap dusun sebanyak 3 buah dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.6. Sarana Prasarana Ibadah Desa

No	Prasarana Ibadah	Jumlah (buah)
1	Masjid	3
2	Langgar / Surau / Mushola	3

Sumber : Data Umum Desa Talang Mulya (2017)

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Talang Mulya, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi Baik. Dalam hal ini beberapa

pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Jalan dalam Desa Talang Mulya meliputi jalan Desa dan jalan RT.

Beberapa ruas jalan di desa sudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2015-2020.

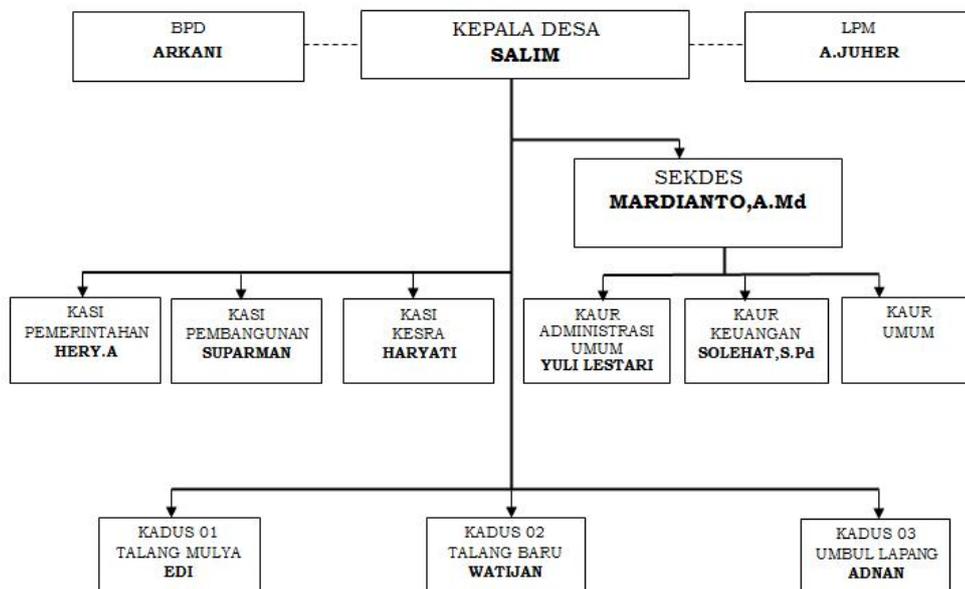
F. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Talang Mulya meliputi: Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

1. Organisasi Pemerintah Desa Talang Mulya

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan,
Kabupaten Pesawaran tahun 2017

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Talang Mulya dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : Arkani
- b. Wakil Ketua : Safriyadi
- c. Sekretaris : Tobri
- d. Bendahara : –
- e. Anggota : Rifai, Basri, Adlani, Samsudin

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Talang Mulya Sebagai Berikut:

- a. Ketua : Juher

- b. Wakil Ketua I : Samsu
- c. Wakil Ketua II : –
- d. Sekretaris : Edi Gunawan
- e. Bendahara : Suratih

Seksi-seksi :

- 1) Seksi agama : M. Latif
 - 2) Seksi Kamtibmas : Mu'in
 - 3) Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi : Samingan
 - 4) Seksi Pendidikan dan Ketrampilan : Busro
 - 5) Seksi Lingkungan Hidup : Sadiran
 - 6) Seksi Pemuda dan Orkes : Arman
 - 7) Seksi Kesra dan Kesehatan : Talen
4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LPKK)
- a. Ketua Umum : Istiqomah
 - b. Wakil Ketua I : Sopiah
 - c. Wakil Ketua II : Lilis
 - d. Sekretaris Umum : Sapariah
 - e. Sekretaris I : Eliawati
 - f. Sekretaris II : Atiyah
 - g. Bendahara : Juni
 - h. Ketua Pokja I : Neneng
 - i. Ketua Pokja II : Samah
 - j. Ketua Pokja III : Nurjanah

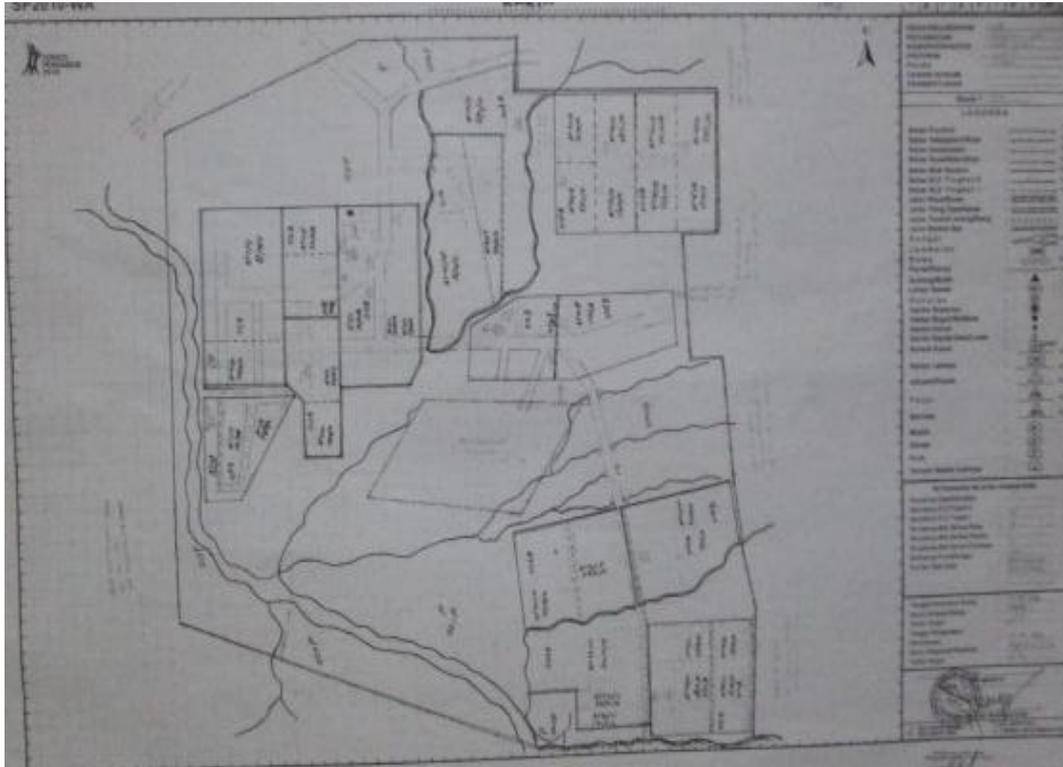
5. Lembaga Kemasyarakatan Pemuda (LKP)

- a. Ketua : Arman
- b. Sekretaris : Uken
- c. Bendahara : Aceng H
- d. Seksi Pengembangan SDM : Husen
- e. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial : Ma'ruf
- f. Seksi Pemuda dan orkes : Arkani
- g. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup : Jony
- h. Seksi Humas : Marhadi

Dengan demikian sebagai gambaran umum lokasi penelitian ini adalah:

1. Desa Talang Mulya Kabupaten Pesawaran yang merupakan desa pemekaran dan tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong rendah yaitu lulusan SMA/Sederajat hanya 40 orang, sedangkan kebanyakanya lulusan SD/Sederajat sebanyak 500 KK.
2. Desa Talang Mulya hanya memiliki satu sekolah dasar (SD) yang terbilang masih minim perhatian dari pemerintah. Kurangnya tenaga pengajar, bangunan fisik dan fasilitas belajar mengajar yang masih kurang memadai. Gedung sekolah dasar ini juga digunakan secara bersama dengan SMP yang ada di desa tersebut. Penghasilan yang diperoleh dari penjualan produk pertanian tidak menjanjikan atau hanya di musim tertentu saja, sehingga belum mampu mencapai hasil yang maksimal. Banyak produk pertanian yang telah dihasilkan di Desa Talang Mulya tidak mampu dipasarkan secara baik.
3. Kurangnya pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan dan ekonomi.

G. Peta Wilayah Desa Talang Mulya Kabupaten Pesawaran



Gambar 4.2
Peta Wilayah Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran tahun 2017

H. Sejarah Singkat PKK di Desa Talang Mulya Talang Mulya

Awalnya terbentuknya PKK Desa Talang Mulya adalah sejak terbentuknya desa, dari pemerintah menganjurkan setiap desa membentuk kelompok ibu PKK. Kegiatan PKK berawal dari melakukan *preleg* atau jimpittan beras. *Preleg* atau jimpittan dilakukan karena terbatasnya ekonomi masyarakat di desa talang mulya dari hasil jimpittan tersebut dijual dan dibeli alat-alat sesuai kebutuhan desa contohnya alat dapur nantinya alat tersebut disewa untuk menambah pemasukkan kas desa PKK dan menjadi modal membuat produk kas desa. Akan tetapi pemanfaatan belum optimal dan belum menjadi pendapatan ekonomi

masyarakat dikarenakan minimnya pengetahuan dan tidaknya pendampingan sehingga mereka hanya dapat membuat produk seadanya secara otodidak. Desa Talang Mulya sangat menyayangkan bahwa dari sekian banyak potensi dan keterampilan yang dimiliki ibu-ibu PKK dalam mengelolah hasil pertanian, juga banyak produk pertanian yang telah dihasilkan tidak mampu dipasarkan secara baik. Oleh sebab itu pak salim selaku kepala Desa Talang Mulya merencanakan untuk pemberian pelatihan kepada ibu-ibu PKK tentang pelatihan produk desa yang dilakukan pada bulan November 2016 yang bekerja sama dengan Mahasiswa Unila dalam organisasi Korps Sukarela (KSR) PMI dibantu oleh dosen-dosen unila dalam memberikan materi yang diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat menambahkan ilmu serta keterampilan untuk ibu-ibu PKK di Desa Talang Mulya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dari di dalam serta kehidupan sosial masyarakat Desa Talang Mulya.

Program Kerja Tim Penggerak Pkk Desa Talang Mulya

1. Bendahara

a. Program Pengelolaan Administrasi Keuangan

Jenis Kegiatan:

- 1) Mengumpulkan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan usulan dari Sekretaris, Bendahara dan Pokja-pokja serta mengajukannya kepada Ketua.
- 2) Menyusun Draft usulan rencana biaya untuk diajukan kepada Kepala Desa Talang Mulya
- 3) Menyusun Standar Operasional Prosedur Keuangan TP. PKK Desa Talang Mulya dan mengajukannya kepada Ketua.

- 4) Melaksanakan pengelolaan Keuangan seperti penerimaan & pengeluaran kas, atas persetujuan Ketua.

b. Program Evaluasi Keuangan

Jenis Kegiatan :

- 1) Membantu memberikan bimbingan tentang pertanggung jawaban keuangan Sekretaris dan Operasional Pokja-pokja setelah kegiatan selesai.
- 2) Menyusun Administrasi pertanggung jawaban keuangan setiap bulan dari Anggota TP. PKK Desa Talang Mulya
- 3) Menyusun Program Kerja Bendahara

2. Sekretaris

a. Program Ketatausahaan

Jenis Kegiatan :

- 1) Membuat dan mengarsipkan semua jenis tulisan organisasi
- 2) Membuat dan mengarsipkan naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan / pemberhentian, Pelantikan / Tim Penggerak PKK Desa Talang Mulya

b. Program Pengorganisasian

Jenis Kegiatan :

- 1) Penataan Struktur Organisasi
- 2) Pendataan Kelompok PKK Dusun, RW/RT, Dasa Wisma
- 3) Penyempurnaan Susunan Anggota TP. PKK
- 4) RAKOR PKK
- 5) RAKON PKK

6) Penertiban atribut PKK

c. Program Perencanaan

Jenis Kegiatan:

Menyusun Program Kerja dan Anggaran Biaya

d. Humas

Jenis Kegiatan :

- 1) Membuat / menyusun dokumentasi foto / VCD & kliping kegiatan
PKK
- 2) Menjilid Sambutan Ketua TP. PKK
- 3) Mengikuti Pameran al : Menampilkan visualisasi kegiatan 10 Program
Pokok PKK
- 4) Mensosialisasikan Materi Hasil RAKERNAS al : dalam kegiatan
Binda & Monev
- 5) Kerjasama dengan mitra luar Lembaga PKK

e. Urusan Rumah Tangga

Jenis Kegiatan :

- 1) Mengelola / mengawasi kebersihan kantor & keperluan dapur
- 2) Pengaturan piket anggota PKK dan rincian Tugas Pegawai
- 3) Penyelenggaraan rapat-rapat (Rapat Pimpinan & Rapat Pleno)
- 4) Pemeliharaan barang milik organisasi/ lembaga atau yang digunakan
Organisasi / lembaga PKK (Service kendaraan bermotor & inventaris
lainnya)

- 5) Biaya Umum al : untuk hadiah & bantuan modal bagi Juara Lomba yang dilaksanakan PKK, ATK, FC, Lembur, Pengadaan barang-barang & BBM
- 6) Transport perjalanan

Pokja I

1. Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Jenis Kegiatan :

- 1) Ketahanan Keluarga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak)
- 2) Pembinaan kegiatan keagamaan Pengajian rutin yang diadakan oleh majelis Ta'lim maupun kegiatan eagamaan lainnya.
- 3) Pembinaan / penyuluhan tentang napza dan obat-obat terlarang
- 4) Pembinaan BKR (bina Keluarga Remaja)
- 5) Sosialisasi Kesetaraan Gender
- 6) Sosialisasi /Pelatihan Program Pemberdayaan Wanita Rawan Ekonomi dan Program Pemberdayaan Keluarga
- 7) Pembinaan kelompok Lansia
- 8) Menggalakan permainan simulasi

2. Program Gotong Royong

Jenis Kegiatan :

- 1) Gerakan Kebersihan Lingkungan dan halaman sekitarnya
- 2) Bantuan Sosial dan Bencana Alam
- 3) Menggerakkan rereongan Sarupi

Pokja II

1. Program Pendidikan dan Keterampilan

Jenis Kegiatan :

- 1) Pembinaan POS PAUD (PAUD Terintegrasi BKB, Posyandu)
- 2) Pemantapan
 - a) POS PAUD
 - b) Keaksaraan Fungsional
 - c) UP2K-PKK
 - d) Sudut Baca
 - e) *Life skill*
- 3) Pembentukan Pos PAUD
- 4) Pemantapan Kelompok PAUD berupa bantuan kelembagaan
- 5) Pembinaan dan Pemantauan Program
 - a) Keaksaraan Fungsional /KF
 - b) *Life skill*

Pelatihan P2WKSS

Pemantapan TBM, Sudut Baca, Perpustakaan

TOT Satuan PAUD sejenis (PAUD Terintegrasi dengan Posyandu-BKB-KBK-Kemas)

Pembinaan dan evaluasi BKB, BKB Kemas (Sapta Bina) dalam menunjang PKLK

2. Program Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

Jenis Kegiatan :

Pembinaan dan Evaluasi UP2K-PKK

Pembentukan dan Pemantapan Koperasi / Pra Koperasi

Pokja III

1. Program Pangan

Jenis Kegiatan :

- a. Sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan
- b. Sosialisasi Gerakan Makan 3B (Beragam, Bergizi dan Berimbang) untuk Ibu Hamil, Ibu menyusui dan Balita di desa Rawan Pangan
- c. Pembinaan Penganekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan gerakan makan 3B dan Aman
- d. Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTPP)
- e. Sosialisasi Gerakan memasyarakatkan Makan Ikan dan Penggunaan Garam Beryodium
- f. Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

2. Program Sandang

Jenis Kegiatan :

- a. Sosialisasi
 - 1) Etika Berbusana
 - 2) Busana Muslim
- b. Pembinaan / Penyuluhan di bidang sandang

3. Program Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

Jenis Kegiatan

- a. Sosialisasi GERSAD PHBS dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Kerja, Sekolah dan Tempat Umum

- b. Penangan rumah kumuh
 - 1) Pendataan
 - 2) Pemberian Stimulan
 - 3) Penyuluhan Rumah Layak Huni

Pokja IV

1. Program Kesehatan

Jenis Kegiatan :

a. Kecamatan siaga

Pembinaan administrasi PKK di Desa/Kel SIAGA (SIP, Cat Dawis, PHBS, LBS, KB Kes)

b. UPGK (Usaha Peningkatan Gizi Keluarga)

a. Monev MP ASI

b. BPB (Bulan Penimbangan Balita)

c. POSYANDU

a. Pelatihan Kader Plus Posyandu

b. Lomba Posyandu dan Kader

c. Posbindu Lansia

d. Revipo (Revitalisasi Posyandu)

d. Penyuluhan

a. Penyuluhan tentang penyakit Degeneratif (Stroke, DM, Osteoporosis, Obesitas, kanker rahim dan kanker Payudara)

b. Penyuluhan tentang penyakit berbasis Lingkungan dan Perilaku

c. Penyuluhan tentang bahaya kehamilan, nifas, dan bersalin

d. Penyuluhan tentang bahaya narkoba

- e. Pertemuan Pokjanal DBD
- f. Penyuluhan tentang pemanfaatan TOGA
- g. Pemanfaatan limbah dapur / Rumah Tangga

2. Program Kelestarian Lingkungan

Jenis Kegiatan :

- a. PHBS
 - a. Pembinaan PHBS tatanan RT (Binwil untuk administrasi Pokja IV)
 - b. Lomba PHBS
 - c. *Baseline Survey* PHBS tatanan perkantoran tk. Prov
 - d. Lomba UKS
 - e. Lomba Lingkungan Bersih an Sehat
 - f. Penyuluhan tentang Pemanasan Global

2. Program Perencanaan Sehat

Jenis Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK KB Kes
Peringatan Kesatuan Gerak PKK Tingkat Desa

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan dan ekonomi. Berdasarkan hasil serta pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan pembuatan produk khas desa di Desa Talang Mulya sudah terlaksana dengan baik dan ada usaha untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan ini, dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Ini dibuktikan dengan adanya sebagian masyarakat yang sadar tentang pentingnya pemberdayaan dengan mendirikan sebuah pelatihan dengan tujuan membelajarkan dan mensejahterakan masyarakat. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, terbukti sekarang masyarakat belajar membuat suatu ketrampilan yang berasal dari alam sendiri yaitu penghasil buah untuk dijadikan produk yang bernilai guna perubahan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Tahap

peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan ketrampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian, ini terbukti dengan adanya evaluasi dan tindak lanjut setelah pelaksanaan kegiatan, kemampuan warga berupa pemasaran dan wirausaha mandiri yang mengantarkan mereka ke keadaan yang lebih sejahtera dan berdaya.

2. Faktor pendorong dan penghambat dari pelaksanaan berkaitan dengan PKK di Desa Talang Mulya adalah :
 - a. Respon positif dari masyarakat yang antusias. Ini terbukti dengan keikutsertaan dan kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan pelatihan berkaitan dengan PKK, proses pembuatan produk khas desa yang tergolong mudah sehingga mudah diterima oleh masyarakat, selain itu kerjasama dalam pemasaran juga menjadi pendorong proses pelaksanaan produksi;
 - b. Potensi alam yang memadai, tersedianya sumber bahan baku yang mudah diperoleh di sekitar wilayah Desa Talang Mulya ikut serta membantu mendapatkan bahan baku produksi dengan mudah, sehingga untuk masalah bahan baku tidak perlu diragukan.

Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan berkaitan dengan PKK di Desa Talang Mulya adalah :

- a. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. sehingga mereka kurang tanggap, tidak cepat mengerti dan memahami apa yang disampaikan;

- b. Masyarakat lebih cenderung untuk menunggu bantuan dana dari Pemerintah khususnya setelah turunnya anggaran dana desa;
- c. Masih minimnya dana yang tersedia untuk melakukan proses kegiatan tersebut
- d. Kurangnya dampingan tim ahli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga yang Bersangkutan

Hendaknya lebih ditingkatkan lagi dalam memberikan penyuluhan tentang program pelatihan PKK kepada masyarakat setempat, perhatian kepada kesehatan para pekerja dan perbaikan tempat juga perlu diperhatikan. Bagi lembaga hendaknya bekerjasama dengan pemerintah memberikan pengarahan dalam pemberdayaan masyarakat khususnya tentang cara penggunaan alat produksi dan melengkapi fasilitas, sarana prasarana agar pelatihan bisa berjalan lebih baik lagi dan semakin berkembang.

2. Bagi Masyarakat

Hendaknya lebih ditingkatkan lagi keaktifannya dalam program pemberdayaan masyarakat, karena partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dari sebuah pelaksanaan pemberdayaan. Masyarakat juga sebaiknya membuat usaha mandiri atau membuat cabang baru agar tujuan pemberdayaan tercapai secara maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Adhary, Agus, 2010, *Pembangunan Ekonomi: Masalah Perkembangan Ekonomi*, LP3S, Jakarta.
- Badrudin, Rudy, 2012, *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM. YKPN.
- Bintarto, R. Prof. Dr, 2011, *Interaksi Desa-Kota*. Yogyakarta. Ghalia Indonesia
- BKKBN, 1985, *Pelembagaan dan Pembudayaan NKKBS*. Jakarta. Pusdiklat Tenaga Program BKKBN. Yusuf E Adie, 2008, *Pengaruh motivasi terhadap kinerja*. Diakses dari <http://teknologikinerja.wordpress.com/2014/08/09/pengaruh-motivasi-terhadap-peningkatan-kinerja>. Padapukul 20.09 WIB Tanggal 08 Mei 2014
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2003, *Hasil Rapat Kerja Daerah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*, Jakarta
- BPS, 2008, *Analisis Perkembangan Statistik. Ketenagakerjaan, Laporan Sosial Indonesia 2007*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dahuri, 2004, *Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Easterlin, 2001, *A Conceptual Model Of Service Quality and Implication for Future Research*. Journal of Marketing. 49, Fall, p. 41-50
- Effendi, 1993, *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerjadan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Gary D, Bouma, 1993, Milles, Mathew B. Dan A, Michael Huberman,, 1992, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 201. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Hamalik, Oemar, 2007, *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herliany, Linda, 2009, *Mitra Desa*. Bandung: PT. Pikiran Rakyat.
- Huda, Miftachul, 2009, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

- Juliantara, 2005, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Pembaruan, Yogyakarta.
- Kleden, Ninuk. 1989.*Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat. Jawa*. Jakarta. Pustaka Jaya.
- Mangkunegara, Anwar Prabu AA, 2009,*Perencanaan & Pengembangan SDM*. Bandung: RefikaAditama
- Martoyo, Susilo, 2009, *Manajemen Sumber Dayamanusia*. Edisi Kedelapan. Jogjakarta: BPFE.
- Mayer dan Sullivan, 2002, *Measuring the Well-Being of the Poor Using Income and Consumption. The Journal of Human Resources*, 38, Special Issue on Income Volatility and Implications for Food Assistance Programs, hal. 1180-1220.
- Mikelsen, 2003,*Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Terjemahan Matheos Nalle, Edisi Ketiga, Februari 2003.
- Miller dan Meiners, 2000, *Teori Mikro ekonomi Intermediate*, penerjemah Haris Munandar. PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta
- Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Solehatul, 2005, *Kemiskinan Masyarakat Petani Desa Di Jawa.*, UnnesPerss, Semarang.
- Nurcholis, Hanif, 2011,*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Onny. S. Prijonodan A.M.W. Pranarka, 1996,*Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya*. Jakarta: CSIS
- Padmowihardjo, Soedijanto, 2004, *Metode Penyuluhan Pertanian*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Purbasari, Arum, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ternak Kelinci di Balai Belajar Bersama Hj. Mudrikah Desa Pagersari*.
- Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

- Puspita Sari, Nur Rika, 2013, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Objek Wisata oleh Kelompok Sadar Wisata Dewabejo di DesaBejiharjo, Kec. Karangmojo, GunungKidul. *Skripsi*. FIP UNY
- Ridlo, 2001, *Kemiskinan di Perkotaan, Semarang*, Unissula.Press.Artikel Sejarah Kota Surakarta. www.wikipedia.com.
- Rusmiyati, Chatarina, 2011, *Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah*. Yogyakarta. B2P3KS
- Siswoyo, Dwi, 2007,*IlmuPendidikan*. Yogyakarta: UNY Pers.
- Soegijoko, 1997, *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Bandung : Yayasan Soegijanto Soegijoko.
- Stiglitz, 2011, *Globalization and its Discontent*, Penguin Books London, EdisiTerjemahan, Jakarta.
- Sudjana, 2001,*Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung. Falah Production
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sulistiyani, AmbarTeguh, 2004, *Kemitraandan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta. Gava Media
- Suparjan & Suyatna, Hempri, 2003, *Pengembangan Masyarakatdari pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta.Aditya Media.
- Totok dan Poerwoko, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Tricahyono, SunitAgus, 2008,*Pemberdayaan Komunitas Terpencil di Provinsi NTT*. Yogyakarta. B2P3KS.
- Usmandan Akbar, 2009, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: BumiAksara.
- Usman, Sunyoto, 2009, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta.PustakaPelajar.
- Usman, Sunyoto, 2010,*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta.PustakaPelajar.
- Widjaja, HAW, 2005, *OtonomiDesa*. Jakarta. Raja GrafindoPersada

World Population Data Sheet, 2013, *Kependudukan*. Diakses dari <http://www.prb.org> Pada pukul 21.30 WIB Tanggal 10 April 2013

Yusuf, Adie, 2008, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta